SALINAN

KEPALA DESA MAJASETRA
KECAMATAN MAJALAYA
PERATURAN DESAMAJASETRA KECAMATAN MAJALAYA
NOMOR : 04 TAHUN : 2017

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS PENCALONAN, PEMILIHAN , PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAJASETRA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa , maka diperlukan adanya pedoman teknis yang mengatur mengenai kelengkapan persyaratan administrasi, teknis penjaringan , penyaringan Calon Kepala Desa dan pelaksanaan kampanye yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang lebih demokratis,tertib, jujur dan adil untuk melahirkan seorang figur Kepala Desa yang mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dan mampu menggali , mengelola potensi sumber daya yang ada serta mampu memahami karakteristik masyarakatnya,agar tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di tingkat desa lebih baik lagi, maka diperlukan adanya aturan teknis mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin (a) dan (b) tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Petunjuk Teknik Tatacara Pencalonan,Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahn Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D);

10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Desa Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAJASETRA

Dan

Pj. KEPALA DESA MAJASETRA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MAJASETRA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATACARA PENCALONAN , PEMILIHAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945 ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung ;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal usul dan adap istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ;
11. Putra Desa adalah mereka yang lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan , kemudian pernah menjadi penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua RT dan RW terkait
12. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat atau Putra Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa ;
13. Calon Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
14. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
15. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa ;
16. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak , wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang definitif ;
17. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
19. Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa ;
20. Hak Pilih adalah Hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya ;
21. Daftar Pemilih Sementara adalah Daftar hasil pendaftaran pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
22. Daftar Pemilih Tetap adalah Daftar hasil pendaftaran pemilih yang telah disahkan ;
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat atau putra desa ;

24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan , baik dari pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih ;
25. Pihak yang berkompeten adalah instansi / lembaga atau perorangan yang memiliki kapasitas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, keagamaan dan kemasyaraatan ;
26. Panitia pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa ;
27. Panitia Pengawas adalah pengawas Pemiihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa yang bersangkutan ;
28. Saksi adalah utusan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan terdaftar di Panitia Pemilihan yang diberi mandat/tugas untuk turut menyaksikan proses pemungutan suara dan penghitungan suara ;
29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah bagian dari panitia pemilihan yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara ;
30. Kampanye adalah merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpiih menjadi Kepala Desa ;
31. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara SLTP seperti MTs. , ST , UP SLTP , Kejar Paket B , Pesantren Salafiah dan telah lulus mengikuti ujian nasional ;
32. Biaya Administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dari mulai pembentukan panitia sampai kepada pelantikan Kepala Desa terpilih ;
33. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan terdaftar di Panitia Pemilihan , yang memiliki tugas membantu Calon Kepala Desa dalam mempublikasikan rencana / program kerja Calon Kepala Desa kepada masyarakat desa setempat ;

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

(2) Pemilihan Kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih

(2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 4

(1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagaimana PNS.

Pasal 6

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus keluar dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa;

Pasal 7

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. Persiapan;

b. Pencalonan;

c. Pemungutan suara; dan

d. Penetapan

(2) Tahapan Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari atas kegiatan;

a. Pemberitahuan tertulis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan;

b. Pembentukan Panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah pemberi tahuan akhir masa jabatan;

c. Dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan atau pembentukan panitia pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan camat atas nama Bupati Bandung berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan;

d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupatii melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan

e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan

a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan)

b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon ditempat umum dalam jangka waktu 20 (dua puluh hari);

c. Penetapan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2(dua) orang dan paling banyak 5(lima) orang;

d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;

e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

f. Masa tenang dalam jangka waktu 3(tiga) hari.

(4) Tahapan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:

a. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau

c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari perolehan suara lebih luas.

(5) Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;

a. Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;

d. Bupati atau pejabat lain yang ditujukan melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati atau camat atau sebutan lain

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari)

(8) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, camat membentuk Panitia Pengawas pemilihan kepala desa.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan Panitia Pemilihan

Pasal 8

(1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD;

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa (RT, RW, LPMD, PKK, Linmas, Karang Taruna) dan Tokoh Masyarakat yang berkedudukan di Desa Majasetra;

(3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaanya terdiri dari :

a. Penanggungjawab pemilihan Kepala Desa dijabat oleh Ketua BPD;

b. Ketua ,Sekretaris ,Bendahara dan para seksi serta anggota diangkat atau dipilih dari unsur-unsur yang ada dalam kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2).

Bagian Kedua
Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 9

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8, keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta Petugas Pendataan Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);

(2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Seksi-seksi terdiri dari :
   - Seksi Pendaftaran Pemilihan;
   - Seksi Pendaftaran,Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon;
   - Seksi Pelaksanaan Pemilihan dan penghitungan suara atau KPPS;
   - Seksi Peralatan/perlengkapan dan dokumentasi;
   - Seksi Usaha;
   - Seksi P3K;
   - Seksi Keamanan;
   - Seksi Konsumsi;
   - Seksi Transportasi

(3) Seksi Pendaftaran Pemilih dalam Pendataan Data Pemilih melibatkan Ketua RW dan RT di wilayah hukum Desa Majasetra;

(4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang pada tiap TPS, ditambah 4 (empat) orang dari unsur Perlindungan Masyarakat.

Pasal 10

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, sebelum melaksanakan tugas, wajib diangkat Sumpah/Janji oleh BPD dihadapkan perwakilan unsur masyarakat,unsur Pemerintah Desa ,unsur Kecamatan dan/atau unsur lainnya;

(2) Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra oleh Ketua BPD dan disaksikan oleh Rohaniawan, dengan mengucapkan susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagai berikut :

"Demi Alloh (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Majasetra dan akan melaksanakan segala peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan proses kegiatan Pemilihan Kepala Desa Majasetra dengan selurus-lurusnya serta bersikap netral".

Pasal 11

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dengan berdasarkan pertimbangan dari Panitia Pengawas.

Pasal 12

Masa Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Bagian Ketiga

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 10

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

a. Menetapkan Jadwal Proses Pencalonan, Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa;

a. Mengajukan Rencana Biaya Pemilihan;

b. Menerima Pendaftaran Bakal Calon;

c. Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Pemilih;

d. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

e. Melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dan Penyaringan Calon Kepala Desa;

f. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa;

g. Menerima dan melakukan penelitian identitas serta persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

i. Melaksanakan Ujian Saringan Calon Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

j. Mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka;

k. Melakukan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

l. Menetapkan Tata Tertib Kampanye;

m. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;

n. Menetapkan tempat pelaksanaan pemungutan suara;

o. Menyiapkan surat pemberitahuan /surat panggilan pelaksanaan pemilihan;

p. Menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

q. Membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan penghitungan suara ;

r. Membuat Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

s. Menetapkan Pencabutan Status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye;

t. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan;

u. Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh komponen sebagai persiapan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan lancar,aman,tertib teratur ,jujur dan adil;

v. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(2) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 11

(1) Panitia untuk mendata hak pilih melalui Seksi Pendaftaran Pemilihan mengangkat Petugas Pemutahiran Data Pemilih ;

(2) Petugas Pemutahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Ketua RW dan RT;

(3) Petugas Pemutahiran Data Pemilih,mempunyai tugas:

a. melakukan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara yang mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden tahun 2014;

b. mencatat warga Desa Majasetra yang belum terdaftar dalam DPS dalam Daftar pemilih Tambahan dalam formulir yang telah disediakan Panitia;

c. melaporkan hasil pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Sementara serta daftar Pemilih Tambahan kepada Panitia melalui Seksi Pemutahiran Data Pemilih untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Majasetra.

Pasal 12

(1) Panitia membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS dengan Surat Keputusan Panitia yang keanggotaannya berasal dari tokoh masyarakat yang independen;

(2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang pada tiap TPS termasuk 4 (empat) orang dari unsur Perlindungan Masyarakat (LINMAS)yang terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 6 (enam) orang anggota ;
c. 4 (empat) orang anggota Linmas.

(3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah /janji oleh Panitia ;

(4) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan pemungutan suara di masing-masing TPS;
b. menyampaikan surat pemberitahuan/panggilan kepada Pemilih Tetap untuk memberikan suara;
c. menerima saksi yang memiliki surat mandat dari calon kepala desa atau dari Ketua Tim Kampanye;

BAB IV
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

(1) Pengawas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas yang dibentuk dengan keputusan Camat;

(2) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Kepolisian Sektor, 1 (satu) orang unsur Komando Rayon Militer, 1 (satu) orang unsur Perangkat Desa, dan 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat Desa;

(3) Penentuan anggota Panitia Pengawas diusulkan oleh Pimpinan lembaga/instansi masing-masing ,kecuali dari dari unsur Tokoh Masyarakat, diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat ;

(4) Susunan Panitia Pengawas terdiri dari :

a. Ketua dari unsur Kepolisian;

b. Wakil Ketua dari unsur Komando Rayon Militer;

c. Sekretaris dari unsur Kecamatan;

d. Anggota dari unsur Perangkat Desa dan Tokoh masyarakat.

(5) Anggaran operasi kegiatan Panitia Pengawas dibebankan kepada anggaran pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

(1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, mempunyai tugas :

a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;

b. Menerima laporan pelanggaran peraturan yang berkaitan dengan pemilihan;

c. Menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan paling lama tidak melampaui hari pelantikan Kepala Desa terpilih;

d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa kepada instansi yang berwenang.

(2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, mempunyai kewajiban:

a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil;

b. Melakukan pengawasan proses pemilihan secara aktif;

c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaraan kepada pihak yang berwenang pada hari itu juga;

d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Panitia Pemilihan;

e. Menyampaikan laporan tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal 16

Masa Tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH
Bagian Pertama

Persyaratan Pemilih

Pasal 17

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Majasetra warga Negara Republik Indonesia yang :

a. terdaftar sebagai Penduduk Desa Majasetra secara sah dan telah betempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;

b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada pelaksanaan pemilihan atau telah / pernah kawin pada saat proses pendaftaran pemilih yang dibuktikan dengan KTP atau KK;;

c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa /ingatannya;

d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

e. Pemilih laki-laki yang beristri lebih dari satu sehingga memiliki dua tempat tinggal dieilayah desa berbeda ,maka hak pilihnya ditentukan berdasarkan KTP/Kartu Keluarga yang dimilikinya secara sah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 18

(1) Penitia Pemilihan melalui Seksi Pendaftaran Pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah,untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur,pemilih dari luar desa,tidak terdaftarnya pemilih,atau pemilih terdaftar 2 (dua) kali;

(2) Pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pengurus RT dan RW setempat;

(3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan ,ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih,maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga
Daftar Pemilh Sementara

Pasal 19

(1) Data Pemilih didasarkan pada Daftar Penduduk Potensi Pemilih (DP4) yang dimutahirkan dan atau mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2015;

(2) Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk pemilihan Kepala Desa Majasetra;

(3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan Validasi dengan melakukan pencocokan dan penelitan (Coklit) oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia;

(4) Daftar pemilih sementara diumumkan dalam papan pengumuman ditempat-tempat terbuka untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang berhak memilih dan dari Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Daftar Pemilh Tambahan

Pasal 20

(1) Bagi warga Desa Majasetra yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 19 namanya belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara melaporkan atau mendaftarkan kepada Petugas Pemutahiran Data Pemilih;

(2) Petugas mencatat nama pemilh tambahan dalam Daftar Pemilih Tambahan;

(3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Nomor Urut
b. Nomor Pemilih
c. Nama Pemilih
d. Tempat tanggal lahir atau usia
e. Status Perkawinan
f. Jenis Kelamin
g. Alamat tempat tinggal
h. Keterangan

Bagian Kelima
Daftar Pemilh Tetap

Pasal 21

(1) Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disahkan menjadi Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Majasetra oleh Panitia yang di tandatangani dan di cap oleh Ketua dan anggota Panitia ;

(2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat 3 (tiga) rangkap yang diperuntukan:

a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada BPD
b. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman
c. 1 (satu) rangkap untuk arsip Panitia dan sebagai bahan penyusunan Salinan DPT untuk tiap TPS.

BAB VI

PENJARINGAN ,PERSYARATAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Pertama
Penjaringan dan Persayaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi dari RW ke RW atau dari dusun ke dusun tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, serta mengumumkan kepada masyarakat tentang pembukaan Pendaftaran Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;

(2) Jadwal Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panitia Pemilihan; dan

(3) Apabila tidak seorang Bakal calon pun dan atau kurang dari 2(dua) Bakal Calon yang mendaftarkan diri sampai batas waktu Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) telah habis, maka panitia dapat memperpanjang waktu Pendaftaran Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak tiga kali dengan ketentuan masing-masing 1 kali lamanya 2 (dua) hari.

Pasal 23

(1) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 22 adalah Penduduk Desa Majasetra ,warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

a. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya sebagaimana ditentukan oleh agamanya;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;

c. Berpendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat yang dibuktikan/menunjukkan ijazah/STTB dan/ atau bukti tanda lulus ujian nasional;

d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan KTP yang masih berlaku;

e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas Narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;

f. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri;

i. Terdaftar sebagai penduduk Desa Majasetra secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (Satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Majasetra, kecuali Putra Desa yang tinggal diluar Desa Majasetra;

j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak;

k. Bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

l. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Putra Desa, bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa Majasetra apabila terpilih menjadi Kepala Desa Majasetra;

(2) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa pada batas waktu yang ditentukan belum lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1), maka Panitia Pemilihan dapat menolak pendaftaran penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 24

(1) Panitia Pemilihan menerima persyaratan Bakal Calon Kepala Desa di Sekretariat Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
(2) Panitia Pemilihan meregistrasi persyaratan administrasi lengkap dan diberi tanda bukti Penerimaan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 25

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang akan mendaftarkan diri harus datang sendiri dan boleh didampingi oleh pendamping ke sekretariat Pemilihan dengan membawa persyarakatan sebagai berikut:
    a. Surat Permohonan Bakal Calon Kepala Desa;
    b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada NKRI dan Pemerintah;
    d. Surat Pernyataan kesediaan menjadi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Majasetra;
    e. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Majasetra;
    f. Surat ijin tertulis dari PimpinanInstansi Induknya, bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
    g. Surat Pernyataan tidak aktif dalam Jabatan Pimpinan dan Anggota BPD yang menjadi Bakal Calon Kepala Desa Majasetra;
    h. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa ,selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak;
    i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap dari Pengadilan Negeri ;
    j. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidata yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;
    k. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari POLRES Bandung;
    l. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Desa Majasetra dengan dibuktikan oleh foto copy KTP dan KK yang dilegalisir Camat Majalaya ,kecuali

bagi putera daerah yang ditinggal di luar Desa Majasetra harus ada keterangan dari Kepala Desa Majasetra dan Camat Majalaya;

m. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter instansi pemerintah yang ditentukan oleh Panitia ;

n. Memiliki Surat ijin Suami dan/atau Istri

o. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan/jabatan dalam suatu lembaga pemerintah/swasta yang sedang atau pernah dilaksanakan;

p. Surat keterangan tidak memiliki utang piutang terhadap BUMDES,Raksa Desa,UED-SP,KUT dan P2KP;

q. Foto Copy Kartu Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon;

r. Foto Copy tanda lunas PBB,selama 3 (tiga) tahun terakhir dari seluruh kekayaan Bumi dan Bangunan yang dimiliki Bakal Calon;

s. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon;

t. Foto Copy ijazah/STTB mulai Pendidikan Dasar sampai pendidikan terakhir paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

u. Naskah Visi ,misi dan Program Bakal Calon yang dibuat secara utuh dan ringkas serta disampaikan secara tertulis dan dalam bentuk softcopy;

t. Pas photo yang terbaru terbaru dan disesuaikan dengan cirri khas yang bersangkutan ukuran 4 X 6 berwarna dan hitam putih masing-masing 6 (enam) lembar dan ukuran Post Card,berwarna masing-masing 2 buah berikut filenya dalam bentuk CD.

(2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih aktif selain membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,harus membawa melampirkan bukti data Laporan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati dan masyarakat melalui BPD

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
Berupa Pemeriksaan Berkas Persyaratan dan/atau Seleksi

Pasal 26

(1) Setelah proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan Calon Kepala Desa;

(2) Pemeriksaan dan penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

(3) Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian berkas belum memenuhi persyaratan diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk melengkapi persyaratan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia;

(4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan tidak boleh diikutsertakan dalam tahapan selanjutnya;

(5) Bakal Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

(6) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi akademis untuk menentukan 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

Pasal 27

(1) Bentuk seleksi akademik berupa testing tertulis dengan bahan materi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta diserasikan dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah ,perkembangan perekonomian pembangunan sosial dan budaya masyarakat yang ada di desa bersangkutan;

(2) Kegiatan seleksi sebgagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya tanggungjawab Panitia;

(3) Dalam pelaksanaan proses seleksi akademis sebagaimana dimaksud ayat (1) panitia dapat bekerja sama dengan pihak terkait yang berkompeten dan dilakukan secara transparan;

(4) Pihak terkait yang berkompenten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

a. Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi /STPDN

b. LSM/Lembaga Penelitian yang aktif dan bergerak dalam bidang pemerintahan,pembangunan atau yang komitmen dengan Good Govermance;

c. Tim akademis yang netral,Independen yang dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :

- Unsur Kecamatan;

- Unsur Cabang Dinas Pendidikan setempat;

- Unsur cendikiawan,Praktisi dan Dunia Usaha;
- Unsur Tokoh masyarakat yang mempunyai wawasan luas.

(5) Tugas Tim seleksi /Pihak Kopenten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:

a. Menyusun jadawal pelaksanaan seleksi yang disesuaikan dengan jadwal Panitia Pemilihan ;

b. Menyusun soal-soal ujian /tes akademis serta kemampuan/penguasaan bidang pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa;

c. Membentuk standar penilaian;

d. Menentukan penilaian hasil ujian seleksi;

e. Menyampaikan hasil penyaringan /seleksi kepada Panitia Pemilihan.

(6) Hasil proses seleksi sebangaimana dimaksud pada ayat (5) ,dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan secara terbuka oleh Panitia Pemilihan ,baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun kepada masyarakat Desa;

(7) Apabila dalam seleksi jumlah bakal calon Kepala Desa kurang dari 2(dua) orang Panitia Pemilihan dapat membuka kembali pendaftaran /penjaringan Bakal Calon Kepala Desa .

BAB VII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pasal 28

(1) Calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi penyaringan ditetapkan dalam keputusan Panitia Pemilihan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

(2) Panitia Pemilihan setelah menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, segera mengadakan rapat untuk menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa melalui undian (dikocok) ,bentuk tanda gambar setiap Calon Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara disertai dengan photo setiap Calon Kepala Desa;

(3) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

(4) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka yang bersangkutan dikenakan sanksi untuk mengganti biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII
KAMPANYE

Bagian Pertama
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 29

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;

(2) Kampanye dilaksanakan bersama-sama dengan di pasilitasi oleh Panitia;

(3) Kampanye dilakukan dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nomor Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon Kepala Desa selesai paling lambat berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;

(4) Dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye:

(5) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan ke Panitia:

(6) Waktu 3 (tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan masa tenang.

Pasal 30

(1) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pasal 29, ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

(2) Hari pertama kampanye dilakukan melalui Rapat Paripurna Istimewa BPD di desa dengan penyampaikan Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Kepala Desa yang berhak dipilih secara berurutan dalam waktu yang sama tanpa diadakan dialog;

(3) Kampanye selanjutnya dilaksanakan bersama-sama di wilayah kerja Kadus yang di Pasilitas oleh Panitia;

(4) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa, maka naskah Visi, Misi dan Program Kerja, sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dokumen resmi Pemerintah Desa baru .

Bagian Kedua
Bentuk Kampanye

Pasal 31

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

a. Rapat Umum;
b. Pemasangan alat peraga ditempat umum.

Pasal 32

(1) Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf a, dilaksanakan didalam gedung atau tenda yang dihadiri oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan daya tampung tempat tersebut dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

(2) Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum sebagaimana dimaksud pasal 31 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa yang bersangkutan ditempat/lokasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pemerintah daerah/pemerintah desa dan atau seijin pemilik tempat yang bersangkutan dengan memperhatikan etika, estetika, keindahan dan kebersihan;

(3) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa definitif, diwajibkan menunjukkan surat ijin cuti dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya selama masa kampanye;

(4) Ijin cuti sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib diberitahukan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal pelaksanaan kampanye.

Pasal 33

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib menyampaikan materi yang diwujudkan dalam Visi, Misi dan Program Kerja secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat;

(2) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, dan Pengawas untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga dan keperluan kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Larangan Kampanye

Pasal 34

Dalam pelaksanaankampanye Calon Kepala Desa dan atau Tim Kampanye dilarang:

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945;
b. Menghina seseorang, memfitnah ,mempermasalahkan agama, suku, ras, dan golongan Calon Kepala Desa lainnya;
c. Menghasut atau mengadu domba seseorang dan atau kelompok masyarakat;
d. Memberi janji-janji muluk kepada masyarakat;
e. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
f. Mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
g. Mengancam dan menggunakan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
h. Merusak dan/atau menghilangkan tanda gambar/alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
i. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah maupun pemerintah desa;
j. Mengunakan tempat peribadatan;
k. Melakukan pawai atau arak arakan baik dilakukan dengan berjalan kaki maupun berkendaraan bermotor sehingga berakibat keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat terganggu;
l. Pejabat Desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa selama masa kampanye.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 35

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye, sebagaimana dimaksud pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye,sebagaimana dimaksud pasal 34 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :

a. Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

b. Penghentian keikutsertaan pelaksanaan kampanye berikutnya bagi Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye yang melanggar larangan tersebut;

c. Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 36

(1) Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang/barang atau jasa lainnya untuk mempengaruhi pemilih;

(2) Pelanggaran ketentuan larangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 37

(1) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Desa yang penyelenggaraanya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditiap TPS ;

(2) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atau saksi yang ditunjuk olehnya, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD dan dapat dihadiri oleh unsur aparatur Pemerintah Daerah;

(3) Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

Pasal 38

Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mempunyai hak memilih, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya;

Pasal 39

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta jujur dan adil;

(2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar/photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;

(3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

(4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengancara apapun;

(5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan,maka setiap pemilih diharuskan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutab suara.

Pasal 40

(1) Pemilih yang pindah tempat tinggal dalam Desa Majasetra harus meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada Pemerintahan Desa dan Panitia Pemilihan setempat ,kemudian melaporkan kepeindahannya kepada Panitia Pemilihan ditempat tinggal yang baru ;

(2) Pemilih yang ingin mengunakan hak pilihnya di TPS lain,karena alas an tertentu harus meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada Panitia Pemilihan /KPPS setempat dan melaporkan kepeindahannya kepada Panitia Pemilihan / KPPS yang baru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 41

(1) Pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 40,kemudian pindah tempat tinggal ,pemilih tersebut harus melapor kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS baru dengan membawa surat keterangan dari KPPS lama;
(2) KPPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,selanjutnya dalam pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat"pindah tempat tinggal;
(3) KPPS ditempat tinggal yang baru ,mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar Pemilih Tetap.

Pasal 42

(1) Pemilih terdaftar yang karena suatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan,dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan mengajukan surat keterangan dari Panitia Pemilihan /KPPS;
(2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayana masayarakat yang tidak dapat dihindari karena saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan,anatara lain tertimpa bencana alam,sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang ditetapkan;
(3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anatara laian penyelenggara/pelaksana pemilihan ,saksi Panitia Pengawas,pemantau,anggota KPPS ,petugas keamanan TPS,pelayanan jasa transportasi umum,pegawai karena tugas pelayanan public dan eartawan yang berasal dari TPS lain,dapat memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat sepanjang yang bersangkutan menunjukan identitas kegiatannya;
(4) Apabila yang bersangkutan tidak dapat melakukan hak pilihnya di TPS tersebut dapat melaksanakan pemilihan di TPS lainnya yang dekat.

Pasal 43

(1) Pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS dan didampingi oleh Saksi;

(2) Atas permintaan Pemilih Tuna Netra, Tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan, bagi :

a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; dan

b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra;

(3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 44

Setiap Calon Kepala Desa, wajib :

a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

b. Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

c. Menerima hasil penghitungan suara.

d. Berlapang dada dalam hal tidak terpilih menjadi Kepala Desa ,serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Pasal 45

(1) Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan ,maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau memberi madat penuh kepada saksi yang ditugaskan;

(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri secara mendadak yang dapat menghambat terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan merugikan umum,kecualiberhalangan tetap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;

(3) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri secara mendadak atau meninggal dunia dan tidak mengakibatkan calon tunggal,sedangkan surat suara sudah dicetak dan surat panggilan sudah disebar ,maka yang bersangkutan secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan Panitia Pemilihan bersama BPD berwenang mengambil keputusan sepihak;

(4) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal;

(5) Untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua ,dengan tetap memperhatikan ketentuan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua
Bentuk dan Model Surat Suara

Pasal 46

(1) Bentuk dan model Surat Suara secara teknik ditetapkan oleh Panitia Pemilihan,dengan memperhatikan nilai estetika dan azas keadilan bagi masing-masing calon yang berhak dipilih;

(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Fhoto Berwarna Calon dan tidak boleh ditambah gambar lain seperti menggunakan gambar yang mirip dengan organisasi peserta pemilu dan atau symbol sesuatu organisasi /lembaga pemerintah atau agama;

(3) Jumlah surat suara yang dicetak dan disediakan Panitia Pemilihan adalah sebanyak jumlah hak pilih tetap ,ditambah 5% surat suara cadangan untuk mengantipasi surat suara yang dikembalikan pemilih karena keliru dicoblos atau rusak;

(4) Tempat pencetakan kartu suara adalah perusahaan yang memenuhi standar Nasional dan Independen.

Bagian Ketiga
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 47

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi dengan BPD,tokoh masyarakat,Ketua RT,Ketua RW,Perangkat Desa Anggota Linmas Kepolisian Sektor, Koramil, Unsur Kecamatan,Panwas Pilkades dan unsur lain yang dianggap perlu yang dihadiri oleh Para Calon Kepala Desa;

(2) Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Paniti Pemilihan untuk membahas tatacara dan Tata tertib teknis pemilihan dan pemungutan suara ,kesiapan panitia dan aparat keamanan dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;

(3) Panitia Pemilihan membuat beberapa surat pernyataan kepada Para Calon Kepala Desa diantaranya :
   a. Pernyataan persetujuan daftar pemilih tetap, Jumlah dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS),dan Jumlah bilik suara;
   b. Surat pernyataan bersama apabila terpilih dan tidak terpilih menjadi Kepala Desa;
   c. Surat Madat penunjukkan saksi
   d. Surat pernyataan dimulai dan ditutupnya pemungutan suara;
   e. Surat pernyataan bersama para tokoh masyarakat dan Tim Sukses masing-masing mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Majasetra.

Bagian Keempat
Sarana dan Perlengkapan Administrasi

Pasal 48

(1) Guna menunjang untuk kelancaran Pemungutan suara Panitia Pemilihan menyediakan sarana dan peralatan sebagai berikut :
   c. Menyediakan lokasi tempat pemungutan (TPS) baik terbuka maupun tertutup;
   d. Menyediakan bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan;
   e. Menyediakan Kotak Suara;
   f. Alas /bantalan busa;
   g. Pencoblos kartu suara;
   h. Tanda Pengenal Panitia;
   i. Karet gelang;

j. Payu Payung;
k. Lem/perekat;
l. Cutter/pisau;
m. Kunci gembok;
n. Spidol ukuran besar dan kecil;
o. Menyediakan Segel;
p. Menyediakan Stiker;
q. Menyediakan Meja dan kursi .

(2) Kelengkapan administrasi yang perlu dipersiapkan :
a. Surat pernyataan persetujuan daftar pemilih;
b. Surat pernyataan kesepakatan jumlah TPS dan Lokasi;
c. Surat pernyataan bersama para calon;
d. Surat pernyataan dimulai dan ditutupnya pemungutan suara;
e. Surat pernyataan sahnya pemungutan suara;
f. Surat pernyataan dan Berita Acara tentang penghitungan suara;
g. Formulir penghitungan suara tiap-tipa TPS;
h. Formulir rekapitulasi hasil perghitungan suara tiap TPS;
i. Blanko surat pernyataan Calon Kepala Desa tentang percepatan dan/atau pengunduran jadwal waktu penutupan pemungutan suara;
j. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa;
k. Pengumuman hasil Pemilihan Kepala Desa;
l. Karton formulir besar penghitungan besar di tiap TPS;
m. Karto formulir besar rekapitulasi penghitungan suara tiap TPS;
n. Karton besar pengumuman hasil pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Jumlah Pemilih,Jumlah TPS dan Lokasi

Pasal 49

(1) Jumlah Kuota Pemilih di masing-masing TPS disesuaikan dengan kebutuhan ;
(2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibagi sesuai dengan jumlah RW;
(3) Lokasi Tempat pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipampangkan Nomor Urut dan Photo Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 50

(1) Tempat pembuatan TPS diusahakan di tempat yang luas, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainya,balai pertemuan masyarakat,gedung kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya,dan GOR dengan ketentuan terlebih dahulu meminta ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut;
(2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara(TPS);
(3) Ukuran panjang TPS sekurang-kurangannya 8 m X10m.

Bagian Keenam
Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa di TPS
Pasal 51

(1) Pemungutan suara dan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa di tiap TPS ,dilaksanakan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
(2) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a.warga Desa Majasetra;
b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdomisili di wilayah kerja KPPS/TPS
d.terdaftar sebagai pemilih;dan
e. tidak menjadi pengurus dan Tim Kampanye salah satu calon Kepala Desa;
(3) Jumlah anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota dan 4 orang petugas keamanan di TPS yang diusulkan oleh Ketua RW kepada Panitia Pemilihan;
(4) Susunan Pengurus KPPS terdiri dari 1(satu) orang Ketua dan 6 orang anggota serta 4 (empat) orang Petugas Keamanan di tiap TPS;
(5) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis
(6) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 52

(1) KPPS menerima,perlengakapan dari Panitia Pemilihan sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang terdiri dari;
a. Kotak Suara ;
b. Bilik Suara ;

c. Surat suara calon sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS,dan ditambah 2,5 % surat suara cadangan;
d. Tinta;
e. ALat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara;
f. Segel pemilihan Kepala Desa;
g. Formulir Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
h. Lem,karet,tali ,label,spidol hitam kecil dan besar ,sampul ,kantong plastic dan ball poin warna biru
i. Gambar calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempelkan didekat pintu masuk di TPS dan dikamar bilik suara;
j. Salinan daftra pemilih tetap (DPT) untuk tiap TPS 1(satu) rangkap;
k. Tanda pengenal KPPS serta pengenal saksi:
l. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
m. Gembok dan anak kunci.

(2) Surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS harus sudah diterima KPPS selambat-lambatanya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

Pasal 53

(1) Tugas Ketua KPPS,anggota KPPS dan Petugas Keamanan sebagai berikut :
a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan penghitungan suara;
b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS dimeja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS,dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu masuk TPS,sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin ;
d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik suara ,dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;

e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasuki surat suara kedalam kotak suara ,dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat kotak suara;dan

f. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya;

g. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam satu orang berada di pintu masuk TPS ,satu orang di pintu keluar dan dua orang dikonsinyir diluar TPS.

(2) Ketua dan Anggota KPPS memyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-PKDM) kepada pemilih diwilayah kerjanya selambat-lambatnya 5(lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

(3) Apabila pemilih tidak ada ditempat ,Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada Kepala Keluarga atau anggota keluarga lainnya,serta menanda tangani tanda terima;

(4) Selambat-lambatnya sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Ketua KPPS menerima surat mandat dari calon Kepala Desa atau Tim Kampanye Calon mengenai saksi calon untuk menghadiri pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 54

(1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS ,KPPS berkewajiban menyediakan:

a. Tempat duduk pemilih untuk menampung sekurang-kurangya 25 (dua puluh lima) orang,ditempatkan di dekat pintu masuk;

b. Meja panjang dan tempat duduk masing-masing Anggota KPPS ;

c. Tempat duduk Saksi masing-masing Calon Kepala Desa ,yang di tempatkan disamping atau dibelakang meja ketua KPPS;

d. Meja untuk kotak suara ,yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS;

e. Papan pengumuman untuk pemasangan Calon Kepala Desa ,yang ditempatkan didekat pintu masuk TPS;

(2) KPPS dengan dibantu oleh Petugas Keamanan TPS bertanggungjawab atas keamanan TPS yang sudah disiapkan .

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 55

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan cara setiap pemilih memberikan suara melalui Kartu Surat Suaranya yang telah ditetapkan oleh Panitia dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa ;

(2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yangtelah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

(4) Susunan Acara Pelaksanaan Pemungutan suara sebagai berikut :

a. Pembukaan ;

b. Pengarahan Teknis dari Ketua KPPS tentang Pemilihan Kepala Desa;

c. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS;

d. Penutupan Pemungutan Suara di TPS;

e. Penghitungan suara;

f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara;

g. Penanda tanganan Berita Acara Penghitungan suara;

h. Pengumuman hasil penghitungan suara dan calon terpilih;

i. Sambutan/Pengarahan Camat;

j. Do'a /Tutup

Pasal 56

(1) Rapat Pemungutan suara di mulai pukul 07.00 waktu setempat ;

(2) Rapat Pemungutan di TPS di hadiri oleh Para Calon Kepala Desa atau Saksi yang diberi mandat untuk menyaksikan langsung jalannya pemungutan suara di TPS;

(3) Ketua KPPS dan Para Calon Kepala Desa atau Saksi memeriksa kamar/bilik suara dan Kotak suara;

(4) Setelah rapat pemungutan suara di buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua KPPS melakukan kegiatan :

a. memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS dan Petugas Keamanan TPS;

b. membuka kotak suara yang berisi surat suara dan kotak suara yang akan digunakan menampung kartu suara yang dicoblos pemilih;

c. mengeluarkan dan menghitung isi kotak suara dan memperlihatkan kotak suara kepada para Calon Kepala Desa atau saksi serta pemilih yang telah hadir, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali;

d. mengunci dan menyegel kotak suara dengan mempergunakan kertas yang telah dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;

e. menempatkan kotak suara pada tempat yang telah ditentukan.

(5) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua KPPS disetiap TPS.

Pasal 57

(1). Setiap pemilih menyerahkan surat undangan pemungutan suara kepada Panitia Pemiihan untuk dicocokkan dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan ;

(2). Pemilih yang hadir yang telah sesuai dengan daftar pemilih tetap , diberikan surat suara oleh KPPS melalui pemangilan berdasarkan urutan kehadiran ;

(3). Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara, dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak ;

(4). Untuk menghindari adanya penduduk luar desa dan pemilih dibawah umur atau menggunakan hak pilihnnya lebih dari satu kali , maka pada saat pemungutan suara ,pemilih harus membawa kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti diri lainnya yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ;

Pasal 58

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

(2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;

(3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberikan tanda oleh KPPS bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pencoblosan;

(4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta kembali surat suara baru kepada KPPS setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos untuk satu kali kesempatan;

(5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

Pasal 59

KPPS menjaga agar setiap pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 60

KPPS menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan Calon Kepala Desa atau saksi untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditetapkan atau melebihi waktu yang ditetapkan.

BAB X

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 61

(1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir;

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPPS tidak dilaksanakan di TPS tetapi di pusatkan di 1(satu) titik yaitu di GOR Desa Majasetra;

(3) Ketua KPPS, Anggota KPPS , Keamanan dan Saksi di TPS membawa Kotak Suara dan perlengkapan lainnya ke GOR Desa Majasetra.

Pasal 62

(1) Sebelum Rapat penghitungan suara dimulai Ketua KPPS meminta kepada para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menugaskan saksi dalam penghitungan suara dengan dilengkapi surat mandat;

(2) Dalam hal tidak seorang pun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 63

(1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS,Ketua KPPS dibantu oleh semua anggota KPPS melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2- PKDM ,berukuran besar ,dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa ,sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa ,sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara;

c. Menempatkan kotak suara di dekat Ketua KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

(2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,KPPS menghitung :

a. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilinya berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk masing-masing TPS yang hadir;

b. Jumlah pemilih dari TPS lain;

c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan

d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 64

(1) Ketua KPPS memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk;

(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS memperlihatkan dan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi.

Pasal 65

(1) Surat suara dinyatakan TIDAK SAH, apabila:

a. Tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah ditetapkan;

b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakilinya;

c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;

d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

e. Memberikan suara lebih dari satu Calon Kepala Desa;

f. Mencoblos tidak tepat pada bagian yang telah ditentukan;

g. Coblosan mengena kedua garis batas kotak suara.

(2) Alasan-alasan yang menyebabkan tidak sahnya surat suara diberitahukan kepada saksi atau pemilih yang hadir saat itu juga;

(3) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara, antara saksi-saksi dengan KPPS, maka Ketua KPPS berkewajiban untuk memutuskannya;

(4) ContohSurat suara yang dinyatakan SAH dan surat suara yang dinyatakan TIDAK SAH,dapat dilihat pada contoh gambar surat suara yang dibuat Panitia.

Pasal 66

(1) Setelah penghitungan selesai Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan:

a. menghitung surat suara yang tidak terpakai;

b. menghitung surat suara yang rusak/blanko;

c. menghitung surat suara yang tidak sah/blanko;

d. menghitung surat suara yang sah.

(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasing-masingTPS dimasukan kepada kedalam sampul yang sudah disediakan dan disegel;

(3) Hasil Penghitungan suara dituangkan dalam Berita acara Pemungutan Suara,dan sertifikat hasil Penghitungan suara di TPS, ditandatangani oleh Ketua KPPS Anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia mendantatangani dibuat rangkap 3 (tiga);

(4) Hasil Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan kedalam sampul diberi segel dan 1 (satu) rangkap Berita Acara Penghitungan Suara dan perlengkapan yang lainnya dimasukan kedalam kotak suara ,pada bagian luar ditempel lebel dan disegel;

(5) Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan lampirannya disampaikan kepada Panitia.

Pasal 67

Salinan Berita Acara (Model C- PKDM),Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1- PKDM),dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1- PKDM) diperuntukan:

a. Informasi Cepat ke Panitia Pemilihan;

b. pengumuman yang ditempel di TPS;

c. saksi-saksi.

BAB XI
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENYUSUNAN BERITA ACARA TINGKAT DESA/PANITIA PEMILIHAN

Pasal 68

(1) Panitia Pemilihan setelah menerima Berita Acara dan sertifikasi penghitungan suara dari KPPS,membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa dan dapat dihadiri oleh saksi calon Pengawas,dan warga masyarakat;

(2) Rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam suatu rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;

(3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat itu juga harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dari yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan;

(4) Calon Kepala Desa atau saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundand-undangan;

(5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan;

(6) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua TPS dalam wilayah kerja Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dansertifikat dari hasil suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2(dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa yang hadir;

(7) Panitia Pemilihan wajib memberikan 1(satu) eksemplar salinan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan sebgaimana dimaksud pada ayat(5) kepada saksi calon yang hadir serta menempelkan 1(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;

(8) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukan kedalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 69

(1) sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :

a. mengatur tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan memasang formulir pencatatan perolehan suara calon berukuran besar,dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa ,sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa;
c. menempatkankotak suara didekat meja pimpinan Panitia Pemilihan dan menyiapkan anak kuncinya.

(2) Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. membuka kotak suara oleh KPPS di wilayah kerjanya masing-masing dengan disaksikan oleh saksi yang hadir;
b. mengeluarkan Berita Acara beserta lampiran yang diterima dari KPPS.

(3) Mencatat pada formulir model D4- PKDM, berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C1- PKDM) yaitu :

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS;

b. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
c. Jumlah pemilih yang terdaftar yang tidak hadir dari seluruh TPS yang bersangkutan.
d. Jumlah pemilih dari TPS lain;
e. Jumlah surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan termasuk surat suara tambahan;
f. Jumlah surat suara yang tidak terpakai/sisa ;
g. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
h. Jumlah surat suara terpakai dari seluruh TPS yang terdiri dari surat suara sah dan surat suara tidak sah.

Pasal 70

(1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap calon dari seluruh TPS ,dengan menggunakan lampiran model D1-PKDM ,berdasarkan sertifikat hasil penhitungan suara dari seluruh TPS yang bersangkutan (Lampiran Model C1- PKDM);

(2) Saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,apabila ternyata terdapat proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima,Panitia Pemilihan pada waktu itu juga mengadakan pembetulan;

(4) Dalam hal saksi tidak menerima penjelasan Panitia Pemilihan ,terhadap keberatan yang diajukan,keberatan saksi dicatat dalam formulir Model D3- PKDM dan proses rekapitulasi dilanjutkan.

Pasal 71

(1) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan lampiran yang memuat rekapitulasi:
   a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap;
   b. Jumlah surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan termasuk surat suara tambahan;
   c. Jumlah suara sah yang diperoleh oleh setiap Calon Kepala Desa Majasetra.

(2) Menyusun Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir D- PKDM,yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Anggota serta saksi Calon Kepala Desa yang hadir dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan;

(3) Apabila terdapat perubahan Berita Acara ,maka Berita Acara tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan dan saksi yang mendatatangani Berita Acara sebelum ada perubahan;

(4) Setiap lembar Berita Acara diparaf dan dicap;

(5) Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,disampaikan kepada:
   a.1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
   b.1 (satu) rangkap masing-masing saksi yang hadir;

(6) Salinan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Lampiran 2 Model D1-PKDM) dipasang pada papan pengumuman di Panitia Pemilihan.

BAB XII
PENGHITUNGAN ULANG

Pasal 72

(1) Penghitungan ulang surat suara bisa dilakukan apabila :
   a. Penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup;
   b. Penghitungan Surat Suara dilakukan diluar tempat dan jadwal yang sudah ditentukan;

c. Saksi, Panitia Pengawas , Pemantau maupun masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas dan terbuka.

(2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

(3) Apabila tidak seorangpun Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan Ulang;

(4) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum dilaksanakan pelantikan, maka untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih harus dilakukan Pemilihan Ulang terhadap Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, kecuali Calon Kepala Desa bersisa 1 (satu) orang Calon Kepala Desa maka harus dilakukan proses penjaringan Balon Kepala Desa kembali;

(5) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penanda-tanganan Berita Acara Pemilihan;

(6) Apabila setelah Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 73

(1). Apabila lebih dari satu calon mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan Pemilihan Ulang hanya untuk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang perolehan jumlah suara terbanyak yang sama;

(2). Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan;

(3). Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya tetap sama, untuk menentukan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi kewenangan BPD melalui mekanisme musyawarah dengan para Calon Kepala Desa.

BAB XIII
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 74

(1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan membuat, menandatangani bersama para saksi dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa dihadapan masyarakat serta menyerahkannya kepada BPD;

(2) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Berita Acara Penghitungan Suara dinyatakan sah;

(3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyatakan sahnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 75

Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan melaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD.

BAB XIV
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN,PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 76

(1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan selanjutnya calon Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;

(2) Bupati menerbitkan keputusan tentang Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;

Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 77

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (2);

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa setempat dihadapan masyarakat;

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji;

(4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :

*"**Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu ta'at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".***

Pasal 78

Apabila Pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur;

Pasal 79

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan persetujuan Bupati dengan ketentuan Kepala Desa lama tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut.

Pasal 80

Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 79, berlaku pula bagi desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 81

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB XV
TUGAS, WEWENANG DAN HAK KEWAJIBAN KEPALA DESA

Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 82

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah memperoleh persetujuan bersama BPD;

d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB.-Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. Membina kehidupan masyarakat desa;

f. Membina perekonomian desa;

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa dengan cara partisipatif;

h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 83

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 82 Kepala Desa mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya;

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nefotisme (KKN);

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;

g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

i. Menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

j. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang desa;

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa;

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;

m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempel pada papan pengumuman, atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat, radio kuminitas atau media lainnya;

(6) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD.

BAB XVI

LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

L a r a n g a n

Pasal 84

Kepala Desa dilarang :

a Menjadi Pengurus Partai Politik;

d. Merangkap jabatan sebagai pimpinan/anggota BPD atau lembaga kemasyarakatan yang ada di desa;

e. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, DPD, atau DPR;

f. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;

g. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminiasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;

h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;

i. Menyalahgunakan wewenang;

j. Melanggar Sumpah/Janji jabatan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 85

(1) Kepala Desa berhenti karena :
   a. Meninggal Dunia;
   b. Atas Permintaan Sendiri;
   c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, karena :
   a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru;
   b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut 6 (enam) bulan;
   c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur pasal 82 ayat (2);
   d. Dinyatakan melanggar Sumpah/Janji;
   e. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur pasal 82 ayat (1);
   f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 84.

(3) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah anggota BPD;

(4) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah anggota BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;

(5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara

Pasal 86

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana penjara dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa usulan BPD, apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 87

Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 88

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 86 ayat (1) dan pasal 87 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatannya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan pengadilan;

(2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 89

Apabila Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 86 ayat (1) dan pasal 87, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pasal 86 ayat (2) dan pasal 87, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 91

(1) Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati;

(2) Hal hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
   a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
   b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 92

(1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada minggu terakhir bulan keenam, BPD mengajukan permohonan pengujian Kesehatan yang bersangkutan kepada penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa);

(2) Apabila berdasarkan keterangan penguji kesehatan, bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB XVII
MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 93

(1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal Kepala Desa berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa, maka diangkat Penjabat Kepala Desa;

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekertaris Desa atau perangkat desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil atau Tokoh Masyarakatatas usul BPD dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat;

(3) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terhitung sejak pelantikan sampai dilantiknya Kepala Desa baru hasil pemilihan;

(4) Penjabat Kepala Desa diambil Sumpah/Janji, dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

BAB XVIII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Mekanisme Pengaduan

Pasal 94

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat maupun Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis, meliputi :

a. Nama dan alamat pelapor;

b. Waktu dan tempat kejadian perkara;

c. Nama dan alamat pelanggar;

d. Nama dan alamat saksi-saksi;

e. Uraian kejadian;

f. Bila ada dilampiri dengan bukti-bukti pelanggaran.

(3) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;

(4) Pelapor dan /atau saksi wajib menandatangani bukti/surat laporan/atau buku tamu yang disediakan pihalk penerima laporan;

(5) Apabila pelapor tidak bersedia menanda tangani bukti/surat laporan/atau buku tamu sebagaimana dimaksud pasa ayat (4) ,serta tidak dilampiri dengan bukti-bukti pelanggaran,maka panitia Pengawas bias menindaklanjuti atau tidak tentang laporan tersebut.

(6) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengawas Pemilihan;

Pasal 95

(1) Panitia Pengawas Pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima;

(2) Panitia Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti atau sebaliknya laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima;

(3) Dalam hal Panitia Pengawas Pemilihan memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima;

(4) Dalam hal laporan yang bersipat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan;

(5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik;

(6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon Kepala Desa Terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindak lanjuti dengan Pembatalan Pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 96

(1) Panitia Pengawas Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pasal 95 ayat (4) dilakukan melalui :

a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;

b. Dalam hal tidak mendapat kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, Panitia Pengawas Pemilihan membuat keputusan.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 97

(1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana yang diatur oleh peraturan desa ini dilakukan sesuai dengan kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 98

(1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kabupaten Bandung;

(2) Pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah) per hak pilih dan diarahkan penggunaannya untuk biaya administrasi;

(3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dibebankan kepada Calon Kepala Desa;

(4) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(5) Penggunaan bantuan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;

(6) Dalam upaya untuk menunjang kelancaran Pemilihan Kepala Desa ,maka Panitia Pemilihan dapat menerima bantuan atau sumbangan biaya Pemilihan Kepala Desa,berupa barang atau unag,baik dari pihak ketiga maupun dari pihak masyarakat atau partipasi dari masyarakat simpatisan calon sendiri bersifat sukarela dan tidak mengikat serta dilakukan semata-mata demi untuk menunjangf kelancaran pemilihan dan kepentingan masyarakat umum.

BAB XX
PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI KEPALA DESA

Pasal 99

(1) Pegawaei Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desaselain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 25 Ayat (1) peraturan ini ,juga harus mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi induknya;

(2) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa ,terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;

(3) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih menjadi Kepala Desa ,dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan stutusnya sebagai Pegawai Negeri;

(4) Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri ,berhak menjapat gaji,kenaikan gaji berkala ,kenaikan pangkat ,penghasilan lainnya dan kepadanya diberikan tanbahan poenghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(5) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa,diberikan oleh instansi induknya dengan memperhatikan penilaian dari Camat;

(6) Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa ,harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan desa ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 100

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Desa,tidak dapat diberhentikan dengan alas an bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pension sebagai Pegawai Negeri;

Pasal 101

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan :

a. Dalam Jabatan Struktural ,fungsional dan anggota DPR/DPD/DPRD ,kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengijinkan;

b. Menjadi Kepala Desa di Desa lain;

Pasal 102

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang ,dikembalikan ke instansi induknya,selama yang bersangkutan belum memasuk masa pensiunnya;

Pasal 103

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa ,harus pula memenuhi ketentua sebagaimana diatur oleh ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 104

Penitia Pemilihan Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan melaporkannya kepada Camat yang disertai dengan bukti-bukti pendukung.

Pasal 105

Pelaksanaan pengawan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara fungsional dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan pengawasan melekat dilakukan oleh Camat.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN

Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tidak Tepat Waktu

Pasal 106

(1) Petunjuk pelaksanaan pemilihan merupakan kelengkapan aturan yang terdiri dari Tata Tertib dan model formulir yang harus dibuat Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan;

(2) Petunjuk pelaksanaan pemilihan disusun dan ditetapkan Panitia Pemilihan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini sepanjang teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Desa atau keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 109

Peraturan desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di : Majasetra
Pada tanggal : 09 Mei 2017

Pj. KEPALA DESA MAJASETRA

ttd

AGUNG RAHADIAN, S.Ip, M.Si

Diundangkan di Majasetra
Pada tanggal : 09 Mei 2017

SEKRETARIS DESA MAJASETRA

ttd

KANKAN HENDRA

JENIS FORMULIR UNTUK PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN KPPS SERTA PENDATAAN PENDUDUK
(FORMULIR MODEL SERI A- PKDM)

1. Usulan Ketua Rukun Warga kepada BPD,tentang Usulan Masyarakat untuk menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa (Model A1- PKDM);

2. Usulan Ketua Rukun Warga kepada Panitia Pemilihan ,tentang Usulan Masyarakat untuk menjadi Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara Kepala Desa (Model A2- PKDM);

3. Surat Permohonan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra,kepada BPD (Model A3- PKDM);

4. Surat Pernyataan bukan Pengurus dan atau Anggota Tim Kampanye Calon Kepala Desa Majasetra (Model A4- PKDM);

5. Surat Pernyataan bukan Pengurus dan atau Anggota Tim Kampanye Calon Kepala Desa Majasetra untuk Ketua dan Anggota KPPS (Model A5- PKDM);

6. Surat Pernyataan Persetujuan Suami/ Istri sebagai Panitia Pemilihan Surat Pernyataan bukan Pengurus dan atau Anggota Tim Kampanye Calon Kepala Desa Majasetra (Model A6- PKDM);

7. Berita Acara Sumpah untuk anggota Panitia Pemilihan oleh BPD Surat Pernyataan bukan Pengurus dan atau Anggota Tim Kampanye Calon Kepala Desa Majasetra (Model A7- PKDM);

8. Berita Acara Sumpah untuk Ketua KPPS oleh Panitia Pemilihan (Model A8- PKDM);

9. Berita Acara Sumpah untuk Anggota KPPS oleh Ketua KPPS (Model A9- PKDM);

10. Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra (Model A10- PKDM)

Ditetapkan : di Majasetra
Pada Tanggal :

Pj.KEPALA DESA MAJASETRA

ttdd

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI

Model A1-PKDM

USULAN
KETUA RUKUN WARGA KEPADA BPD
TENTANG
MASYARAKAT YANG DIUSULKAN MENJADI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Kepada Yth.
Bapak Ketua BPD Majasetra
di
MAJASETRA

Dengan hormat,
Ketua Rukun Warga (RW) ….. Desa Majasetra,Kecamatan Majalaya,sesuai dengan penilaian kami dan keinginan masyarakat yang bersangkutan untuk diusulkan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ,dari warga kami ,yaitu :

1. Nama : ……..
   Tempat ntgl.Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   ……..

2. Nama : ……..
   Tempat ntgl.Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   ……..

Demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa Majasetra dan kualifikasi yang Bapak perlukan agar yang bersangkutan dilakukan proses berikutnya penyaringan Panitia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan ini kami sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Majasetra, ……..

RUKUN WARGA …… DESA MAJASETRA
KETUA,

……

Model A2-PKDM

USULAN
KETUA RUKUN WARGA KEPADA BPD
TENTANG
MASYARAKAT YANG DIUSULKAN MENJADI ANGGOTA KPPS
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Kepada Yth.
Bapak Ketua BPD Majasetra
di
MAJASETRA

Dengan hormat,

Ketua Rukun Warga (RW) ….. Desa Majasetra,Kecamatan Majalaya,sesuai dengan penilaian kami dan keinginan masyarakat yang bersangkutan untuk diusulkan menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Anggota LINMAS Pemilihan Kepala Desa ,dari warga kami ,yaitu :

1. Nama : ……..
   Tempat ntgl.Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   ……..

2. Nama : ……..
   Tempat ntgl.Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   ……..
3. Nama : ……..
   Tempat ntgl.Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   ……..
4. Nama : ……..
   Tempat ntgl.Lahir : ……..
   Pekerjaan : ……..
   Alamat : ……..
   ……..

Demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa Majasetra dan kualifikasi yang Bapak perlukan agar yang bersangkutan dilakukan proses berikutnya penyaringan Panitia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian usulan ini kami sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Majasetra, ……..

RUKUN WARGA …… DESA MAJASETRA
KETUA,

……

Model A3-PKDM

SURAT PERMOHONAN
MENJADI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Kepada Yth.
Bapak Ketua BPD Majasetra
di
MAJASETRA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini ,saya :

1. Nama : ……..

   Tempat ntgl.Lahir : ……..

   Pekerjaan : ……..

   Alamat : ……..
   ……..

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra .

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak ,berikut ini saya lampirkan :
1. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Desa Majasetra;
2. Pas Photo ukuran 3x4 cm ,sebanyak 2 (dua) buah;
3. Surat pernyataan bukan pengurus dan atau anggota serta tim kampanye calon;
4. Surat pernyataan/persetujuan Suami / Istri

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Majasetra, ……..

Pemohon.,

……

Model A4-PKDM

SURAT PERNYATAAN
BUKAN PENGURUS DAN ATAU ANGGOTA SERTA TIM KAMPANYE
CALON KEPALA DESA MAJASETRA
UNTUK MENJADI CALON PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA MAJASETRA

Yang bertanda tangan di bawah ini ,saya :

1. Nama : ……..

   Tempat ntgl.Lahir : ……..

   Pekerjaan : ……..

   Alamat : ……..
   ……..

Dengan ini saya menyatakan,bahwa saya bersedsia menjadi Calon Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ;

Pencalonan saya ini yang bersal dari RW. …. ,wilayah Dusun A / B / C *),Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ;

Disamping itu saya nyatakan bahwa saya bukan pengurus dan atau anggota serta Tim Kampanye Calon Kepala Desa Majasetra ,dan saya sanggup dan tunduk terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ,berkenaan dengan pencalonan pemilihan Kepala Desa;

Apabila pernyataan ini ,dikemudian hari terbukti tidak benar ,saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Majasetra, ……..

Yang Membuat Pernyataan,

……

**) Coret yang tidak dipilih*

Model A5-PKDM

SURAT PERNYATAAN
BUKAN PENGURUS DAN ATAU ANGGOTA SERTA TIM KAMPANYE
CALON KEPALA DESA MAJASETRA
UNTUK MENJADI ANGGOTA KPPS
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Yang bertanda tangan di bawah ini ,saya :

1. Nama : ……..

   Tempat ntgl.Lahir : ……..

   Pekerjaan : ……..

   Alamat : ……..
   ……..

Dengan ini saya menyatakan,bahwa saya bersedia/sanggup menjadi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ;

Pencalonan saya ini yang bersal dari RW. …. ,wilayah Dusun A / B / C *),Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ;

Disamping itu saya nyatakan bahwa saya bukan pengurus dan atau anggota serta Tim Kampanye Calon Kepala Desa Majasetra ,dan saya sanggup dan tunduk terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ,berkenaan dengan pencalonan pemilihan Kepala Desa;

Apabila pernyataan ini ,dikemudian hari terbukti tidak benar ,saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Majasetra, ……..

Yang Membuat Pernyataan,

……

**) Coret yang tidak dipilih*

Model A6-PKDM

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN SUAMI / ISTRI *)
SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Yang bertanda tangan di bawah ini ,saya :

Nama : ……..

Tempat ntgl.Lahir : ……..

Pekerjaan : ……..

Alamat : ……..
……..

Adalah Suami / Istri*), dari :

Nama : ……..

Tempat ntgl.Lahir : ……..

Pekerjaan : ……..

Alamat : ……..
……..

Dengan ini saya menyatakan,bahwa saya tidak keberatan Suami / Istri *) saya sebagai calon Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ;

Demikian surat pernyataan tidak keberatan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Majasetra, ……..

Yang Membuat Pernyataan,

……

**) Coret yang tidak dipilih*

Model A7-PKDM

BERITA ACARA SUMPAH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

BERITA ACARA
Nomor : …../BA/BPD/2017

PENGAMBILAN SUMPAH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Pada hari ini ……,Tanggal,……..,Bulan,…….. Tahun Dua ribu dua belas bertempat di Balai Musyawarah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung:

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Telah mengambil Sumpah /Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra ,sebagaimana nama-nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra terlampir.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Majasetra Nomor : …. /BPD/…../2017,tanggal ,……tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra.

Dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : .....

   Jabatan : .....

2. Nama : ……..

   Jabatan : ……..

Serta didampingi oleh seorang Rohaniawan :

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Agama : ……..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra ,yang diangkat Sumpah/Janji sebagai Panitia Pemilihan dengan mengucapkan Sumpah/Janji sebagai berikut :

DEMI ALLAH ,SAYA BERSUMPAH/JANJI

“BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN DESA MAJASETRA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;
BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA TIDAK AKAN TUNDUK PADA TEKANAN DAN PENGARUH APAPUN DARI PIHAK MANAPUN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DESA MAJASETRA DAN PERUNDANG-UNDANGAN;
BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SAYA,AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH ,JUJUR,ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA ,TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.”

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa majasetra ini,dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majasetra, ……..

Wakil Yang Diangkat Sumpah | Yang Mengangkat Sumpah

…….. | …….

Saksi-Saksi

…….. | …….

ROHANIAWAN

…….

**) Coret yang tidak dipilih*

Model A8-PKDM

BERITA ACARA SUMPAH

KETUA KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

BERITA ACARA
Nomor : …../BA/BPD/2017

PENGAMBILAN SUMPAH
KETUA KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Pada hari ini ……,Tanggal,……,Bulan,…….. Tahun Dua ribu dua belas bertempat di Balai Musyawarah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung:

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Telah mengambil Sumpah /Janji Ketua KPPS Pemilihan Kepala Desa Majasetra :

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Agama : ……..

TPS : ……..

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Nomor : …. /PAN /…../2017,tanggal ,……tentang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS…..

Dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : .....

   Jabatan : .....

2. Nama : ……..

   Jabatan : ……..

Serta didampingi oleh seorang Rohaniawan :

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Agama : ……..

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra ,yang diangkat Sumpah/Janji sebagai Panitia Pemilihan dengan mengucapkan Sumpah/Janji sebagai berikut :

DEMI ALLAH ,SAYA BERSUMPAH/JANJI

“BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN DESA MAJASETRA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA TIDAK AKAN TUNDUK PADA TEKANAN DAN PENGARUH APAPUN DARI PIHAK MANAPUN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DESA MAJASETRA DAN PERUNDANG-UNDANGAN;
BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SAYA,AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH ,JUJUR,ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA ,TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.”

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra ini,dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majasetra, ……..

Yang Diangkat Sumpah
Ketua KPPS TPS.01

Yang Mengangkat Sumpah

…….. …….

Saksi-Saksi

…….. …….

ROHANIAWAN

…….

**) Coret yang tidak dipilih*

Model A9-PKDM

BERITA ACARA SUMPAH

ANGGOTA KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

BERITA ACARA
Nomor : …../BA/BPD/2017

PENGAMBILAN SUMPAH
ANGGOTA KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

Pada hari ini ……,Tanggal,……..,Bulan,…….. Tahun Dua ribu dua belas bertempat di Balai Musyawarah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung:

Nama : ……..

Jabatan : ……..

Telah mengambil Sumpah /Janji Anggota KPPS Pemilihan Kepala Desa Majasetra :

1. Nama : ……..
   Jabatan : ……..
   Agama : ……..
   TPS : ……..

2. Nama : ……..
   Jabatan : ……..
   Agama : ……..
   TPS : ……..

3. Nama : ……..
   Jabatan : ……..
   Agama : ……..
   TPS : ……..

4. Nama : ……..
   Jabatan : ……..
   Agama : ……..
   TPS : ……..

5. Nama : ……..
   Jabatan : ……..
   Agama : ……..
   TPS : ……..

6. Nama : ……..
   Jabatan : ……..
   Agama : ……..
   TPS : ……..

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Nomor : …. /PAN /…../2017,tanggal ,……tentang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS…….
Dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama :

   Jabatan : Ketua Rukun Warga (RW) …… Desa Majasetra

2. Nama : ……..

   Jabatan : Ketua Rukun Tetangga (RT) …… Desa Majasetra Serta

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra ,yang diangkat Sumpah/Janji sebagai Panitia Pemilihan dengan mengucapkan Sumpah/Janji sebagai berikut :

DEMI ALLAH ,SAYA BERSUMPAH/JANJI

"BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN DESA MAJASETRA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA TIDAK AKAN TUNDUK PADA TEKANAN DAN PENGARUH APAPUN DARI PIHAK MANAPUN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN DESA MAJASETRA DAN PERUNDANG-UNDANGAN;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SAYA,AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH ,JUJUR,ADIL DAN CERMAT DEMI SUKSESNYA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA ,TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN."

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra ini,dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majasetra, ……..

Perwakilan yang diangkat Sumpah
Anggota KPPS TPS.01

Yang Mengangkat Sumpah
Ketua KPPS,

……..

…….

Saksi-Saksi

Ketua RW…..

Ketua RT……

……..

…….

**) Coret yang tidak dipilih*

Model A10-PKDM

BERITA ACARA PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

BERITA ACARA
Nomor : …../BA/BPD/2017

Pada hari ini ……,Tanggal,……..,Bulan,…….. Tahun Dua ribu dua belas bertempat di Balai Musyawarah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung:

Telah dilaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra ,berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majasetra Nomor: ……/BPD/……/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra sebanyak ……. Orang dengan susunan kepanitian sebagai berikut :

1. Nama : ……..
   Jabatan : Ketua

2. Nama : ……..
   Jabatan : Sekretaris

3. Nama : ……..
   Jabatan : Bendahara

4. Nama : ……..
   Jabatan : Seksi Pendaftaran Pemilih

5. Nama : ……..
   Jabatan : Seksi Pendaftaran Penjaringan dan Penjaringan Balon

6. Nama : ……..
   Jabatan : Seksi Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan

7. Nama : ……..
   Jabatan : Seksi Perlengkapan , Peralatan dan Dokumentasi Pemilihan

8. Nama : ……..
   Jabatan : Seksi Humas
9. Nama : ……..
   Jabatan : Seksi Keamanan

10. Nama : ……..
    Jabatan : Seksi P3K

11. Nama : ……..
    Jabatan : Seksi Konsumsi

12. Nama : ……..
Jabatan : Seksi Usaha

13. Nama : ……..
Jabatan : Seksi Transportasi Angkutan Pemilih Pemilihan Kepala Desa Majasetra

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NOTULEN KETUA BPD MAJASETRA

ADE HALIMAN AHMAD SOLEH

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa Majasetra,

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI

JENIS FORMULIR UNTUK PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA
(FORMULIR MODEL SERI AA-PKDM)

1. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Majasetra (Model AA1- PKDM);
2. Surat Permohonan Bakal Calon Kepala Desa Majasetra (Model AA2- PKDM);
3. Surat Pernyataan bersedia /sanggup menjadi Bakal Calon /Calon Kepala Desa Majasetra (Model AA3- PKDM);
4. Visi,Misi dan Program Calon Kepala Desa Majasetra (Model AA4- PKDM);
5. Surat Pernyataan bersedia diperiksa kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari doter Pemerintahan (Model AA5- PKDM);
6. Daftar Riwayat Hidup (Curuculum Vitae) Bakal Calon Kepala Desa Majasetra (Model AA6- PKDM);
7. Surat Pernyataan tidak pernah Menjabat sebagai Kepala Desa selama 2(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Model AA7- PKDM);
8. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri selama pencalonan menjadi Kepala Desa Majasetra (Model AA8- PKDM);
9. Tim Kampanye /Juru Kampanye Bakal Calon Kepala Desa Majasetra (Model AA9- PKDM);

Ditetapkan : di Majasetra
Pada Tanggal :

KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI

Model AA1-PKDM

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO	JENIS PERSYARATAN CALON	KETERANGAN
1	2	3
1	Surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa.	Ditulis tangan sendiri diatas kertas segel/matera 6.000,-ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan .
2	Foto Copi Ijazah / STTB SD dan SLTP	Dilegalisir pihak sekolah dan instansi terkait dan dibuktikan dengan memperlihatkan Ijazah / STTB **asli** ;
3	Foto Copy Akta Kelahiran	Dilegalisir oleh instansi terkait
4	Foto Copi Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Dilegalisir Kepala Desa dan Camat
5	Surat Keterangan Sehat Jasmani	Dari Dokter Pemerintah dan Foto Copinya dilegalisir
6	Surat keterangan bebas Narkoba	Dari Dokter Pemerintah dan Foto Copinya dilegalisir
7	Surat Keterangan Sehat Rohani	Dari Dekter (Psikiater) Pemerintah dan Foto Copinya dilegalisir .
8	Surat Keterangan Kelakuan Baik / Catatan Kepolisian (SKCK)	Dari instansi berwenang dan Foto copinya dilegalisir/POLRES Bandung
9	Surat Pernyataan tidak pernah dihukum paling singkat 5 tahun	Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan foto copinya dilegalisir
10	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilih	Dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan foto copinya dilegalisir
11	Surat Keterangan Domisili / bertempat tinggal tetap	Dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat
12	Surat Keterangan sebagai putra Desa (khusus bagi putra desa)	Dikeluarkan oleh RT / RW / dan Kepala Desa
13	Surat pernyataan belum pernah menjadi Kepala Desa /menjabat Kepala Desa lebih dari 1 (satu) kali	Dibuat sendiri ybs. bermaterai 6.000,-dan diketahui Kepala Desa ;
14	Surat Pernyataan setia dan taat Kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI	Dibuat sendiri ybs. bermaterai 6.000, diketahui Kepala Desa dan Camat .
15	Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan / jabatan di Lembaga Pemerintah/Swasta ;	Dibuat sendiri ybs. Bermaterai 6.000 , diketahui Kepala Desa ;
16	Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan / pajak lainnya	Dari Instansi terkait ;
17	Surat pernyataan tidak mempunyai utang kepada Pemerintah	Dibuat sendiri oleh ybs di atas kertas bermaterai 6.000,-
18	Daftar Riwayat Hidup	Ditulis tangan sendiri/hurup kapital

19	Pas Photo Berwarna	Ukuran 4 x 6 cm 6 buah
20	Pas Photo Hitam putih	Ukuran 4 x 6 cm 6 buah
21	Surat Keterangan ijin dari atasan bagi Pegawai Negeri	Dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja
22	Photo Copy surat Keputusan terakhir sebagai Pegawai negeri yang Pensiun	Dilegalisir oleh instansi yang berwenang
23	Surat Pernyataan bersedia menjadi Calon Kepala Desa	Dibuat oleh Ybs, diketahui oleh Kepala Desa dan Camat
24	Makalah Visi . Misi dan Program Kerja	Dibuat sendiri dalam bentuk Makalah atau proposal
25	Ijin Suami dan/atau Istri	Ditanda tangani oleh Suami /Istri
26	Photo Copy Piagam Penghargaan/Setifikat atau tanda jasa penghargaan lainnya yang dimiliki (apabila ada)	
		DITETAPKAN DI : MAJASETRA PADA TANGGAL: 2017 KEPALA DESA MAJASETRA **AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI**

Model AA2-PKDM

SURAT PERMOHONAN
BAKAL CALON
KEPALA DESA MAJASETRA

Kepada Yth.
Bapak Bupati Bandung
Melalui
Bapak Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra
Di
MAJASETRA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya :

Nama : ……

Tempat Tanggal Lahir : ……

Pekerjaan : ……

Alamat : Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra
Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk bursa pencalonan Kepala Desa Majasetra periode 2017-2018 pada pemililhan Kepala Desa tahun 2017.
Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak,berikut ini saya lampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Permohonan Bakal Calon Kepala Desa;
b. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta setia kepada NKRI dan Pemerintah;
d. Surat Pernyataan kesediaan menjadi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Majasetra;
e. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Majasetra;
f. Surat ijin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya, bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
g. Surat Pernyataan tidak aktif dalam Jabatan Pimpinan dan Anggota BPD yang menjadi Bakal Calon Kepala Desa Majasetra;
h. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa ,selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak;
i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;
j. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan,yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidata yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;
k. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari POLRES Bandung;
l. Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Desa Majasetra dengan dibuktikan oleh foto copy KTP dan KK yang dilegalisir Camat Majalaya,kecuali bagi putera daerah yang ditinggal di luar Desa Majasetra harus ada keterangan dari Kepala Desa Majasetra dan Camat Majalaya;
m. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter instansi pemerintah yang ditentukan oleh Panitia ;

n. Memiliki Surat ijin Suami dan/atau Istri
o. Belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan/jabatan dalam suatu lembaga pemerintah/swasta yang sedang atau pernah dilaksanakan;
p. Surat keterangan tidak memiliki utang piutang terhadap BUMDES,Raksa Desa,UED-SP,KUT dan P2KP;
q. Foto Copy Kartu Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon;
r. Foto Copy tanda lunas PBB,selama 3 (tiga) tahun terakhir dari seluruh kekayaan Bumi dan Bangunan yang dimiliki Bakal Calon;
s. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon;
t. Foto Copy ijazah/STTB mulai Pendidikan Dasar sampai pendidikan terakhir paling rendah tamat sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
u. Naskah Visi ,misi dan Program Bakal Calon yang dibuat secara utuh dan ringkas serta disampaikan secara tertulis dan dalam bentuk softcopy;
t. Pas photo yang terbaru terbaru dan disesuaikan dengan cirri khas yang bersangkutan ukuran 4 X 6 berwarna dan hitam putih masing-masing 6 (enam) lembar dan ukuran Post Card,berwarna masing-masing 2 buah berikut filenya dalam bentuk CD.

Demikian permohonan ini saya sampaiakan,untuk dijadikan bahan pertimbangan dan proses selanjutnya .Atas segala perhatiannya ,saya ucapakan terima kasih.

Majasetra, ……..

BALON KEPALA DESA MAJASETRA
Pemohon,

Materai
Rp.6.000

……..

Model AA3-PKDM

SURAT – PERNYATAAN
KESEDIAN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya :

Nama : ……

Tempat Tanggal Lahir : ……

Pekerjaan : ……

Alamat : Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Dengan ini saya menyatakan ,bahwa saya bersedia /sanggup menjadi Bakal Calon /Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Disamping itu,saya nyatakan pula bahwa saya sanggup dan tunduk terhadap semua Undang-undang dan Peraturan yang berlaku, berkenaan dengan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tahun 2017 dengan Masa Bhakti 2017-2018.

Apabila pernyataan ini ,dikemudian hari terbukti tidak benar,saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Majasetra, ……..

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000

……..

Model AA4-PKDM

VISI DAN MISI
BAKAL CALON KEPALA DESA MAJASETRA

I. VISI

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

II. MISI

……..
……..
……..
……..

III. PROGRAM KERJA

A. JANGKA PENDEK

……..
……..
……..
……..

B. JANGKA PANJANG

……..
……..
……..
……..

Model AA5-PKDM

SURAT – PERNYATAAN
KESEDIAN DIPERIKSA KESEHATAN
OLEH DOKTER PEMERINTAH
YANG DITENTUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya :

Nama : ……

Tempat Tanggal Lahir : ……

Pekerjaan : ……

Alamat : Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Dengan ini saya menyatakan ,bahwa saya bersedia diperiksa jasmani ,rohani dan bebas Narkoba oleh dokter Instansi Pemerintah yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra ,sebagai kelengkapan data kesehatan bakal calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Masa Bhakti 2017-2018.

Apabila pernyataan ini ,dikemudian hari terbukti tidak benar,saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Majasetra, ……..

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000

……..

Model AA6-PKDM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAKAL CALON
KEPALA DESA MAJASETRA

A. IDENTITAS BAKAL CALON :

Nama Lengkap : ……
Nama Panggilan : ……
Tempat/Tgl. Lahir : ……
Jenis Kelamin : ……
Pendidikan Terakhir : ……
Suku Bangsa : ……
A g a m a : ……
Status Perkawinan : ……
Golongan Darah : ……
Pekerjaan : ……
Alamat Rumah : Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
Telepon : Rumah …… Hp. ……
Alamat Pekerjaan : ……
Kantor : Kantor …… Kode Pos ……...
Nomor KTP : ……
Nomor Kartu Keluaga : ……

B. IDENTITAS KELUARGA :

1. Nama Isteri/Suami : ……
Tempat/Tagl. Lahir : ……
Pendidikan Terakhir : ……
Pekerjaan : ……
Jabatan : ……
Alamat : Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
Telepon : Rumah …… Hp. ……
Nomor KTP : ……

2. Nama Anak ke-1 : ……
Tempat/Tgl.Lahir : ……
Pekerjaan : ……
Status Anak : ……
3. Nama Anak ke-1 : ……
Tempat/Tgl.Lahir : ……
Pekerjaan : ……
Status Anak : ……

4. Nama Anak ke-1 : ……
Tempat/Tgl.Lahir : ……
Pekerjaan : ……
Status Anak : ……

C. IDENTITAS ORANG TUA :

1. Nama Ayah : ……
   Tempat/Tagl. Lahir : ……
   Pendidikan Terakhir : ……
   Pekerjaan : ……
   Jabatan : ……
   Alamat : Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
   Telepon : Rumah …… Hp. ……

2. Nama Ibu Kandung : ……
   Tempat/Tagl. Lahir : ……
   Pendidikan Terakhir : ……
   Pekerjaan : ……
   Jabatan : ……
   Alamat : Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
   Telepon : Rumah …… Hp. ……

IV. SAUDARA KANDUNG :

NO.	NAMA	L/P	UMUR	HUB.KELUARGA
1	……	……	……	……
2	……	……	……	……
3	……	……	……	……
4	……	……	……	……
5	……	……	……	……
6	……	……	……	……
7	……	……	……	……
8	……	……	……	……
9	……	……	……	……

V. PENDIDIKAN :

NO.	NAMA SEKOLAH	BERTEMPAT	TAHUN LULUS
1	……	……	……
2	……	……	……
3	……	……	……
4	……	……	……
5	……	……	……

VI. PELATIHAN /KURSUS/SEMINAR/SIMPOSIUM :

NO.	JENIS	PENYELENGGARA	TAHUN
1	……	……	……
2	……	……	……
3	……	……	……
4	……	……	……
5	……	……	……
6	……	……	……
7	……	……	……
8	……	……	……

VII. PENGALAMAN KERJA :

NO.	INSTANSI /UNIT KERJA	JABATAN	TAHUN
1	……	……	……
2	……	……	……
3	……	……	……
4	……	……	……
5	……	……	……
6	……	……	……
7	……	……	……
8	……	……	……

VIII. PENGALAMAN ORGANISASI :

NO.	JENIS ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	……	……	……
2	……	……	……
3	……	……	……
4	……	……	……
5	……	……	……
6	……	……	……
7	……	……	……
8	……	……	……

Apabila Daftar Riwayat Hidup ini,dikemudian hari terbukti tidak benar ,saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Denikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bahan peretimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Model AA7-PKDM

SURAT – PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya :

Nama	: ……
Tempat Tanggal Lahir	: ……
Pekerjaan	: ……
Alamat	: Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Dengan ini saya menyatakan ,bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama .

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan pencalonan saya sebagai bakal calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Periode 2017-2018.

Apabila pernyataan ini ,dikemudian hari terbukti tidak benar,saya bersedia menanggung akibat hukumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Majasetra, ……..

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000

……..

Model AA8-PKDM

SURAT – PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SELAMA PENCALONAN MENJADI
KEPALA DESA MAJASETRA

Yang bertanda tangan di bawah ini,saya :

Nama	: ……
Tempat Tanggal Lahir	: ……
Pekerjaan	: ……
Alamat	: Kp. …….. RT…./RW…. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Dengan ini saya menyatakan ,bahwa saya tidak akan mengundurkan diri selama pencalonan menjadi Kepala Desa Majasetra,dimulai sejak pendaftaran calon diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra sampai dengan berakhirnya proses pemilihan Kepala Desa Majasetra.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan pencalonan saya sebagai bakal calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabuapaten Bandung Periode 2017-2018.

Apabila pernyataan ini ,dikemudian hari terbukti tidak benar,saya bersedia menanggung akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang diberlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan maklum adanya.

Majasetra, ……..

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000

……..

Model AA9-PKDM

TIM KAMPANYE
CALON KEPALA DESA MAJASETRA

Yang bertanda tangan di bawah ini ,Saya Calon Kepala Desa Majasetra:

Nama : ……..
Tempat ntgl.Lahir : ……..
Pekerjaan : ……..
Alamat : ……..
……..

Berikut ini saya sampaikan nama-nama Tim Kampanye /Juru Kampanye,sebagai berikut :

1.Nama : ……..
Tempat ntgl.Lahir : ……..
Pekerjaan : ……..
Alamat : ……..
……
2.Nama : ……..
Tempat ntgl.Lahir : ……..
Pekerjaan : ……..
Alamat : ……..
……
3.Nama : ……..
Tempat ntgl.Lahir : ……..
Pekerjaan : ……..
Alamat : ……..
……
4.Nama : ……..
Tempat ntgl.Lahir : ……..
Pekerjaan : ……..
Alamat : ……..
……
5.Nama : ……..
Tempat ntgl.Lahir : ……..
Pekerjaan : ……..
Alamat : ……..
…….

Demikian nama-nama Tim Kampanye/Juru Kampanye ini kami sampaikan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya serta semua pihak mengetahui dan memaklum adanya.

Majasetra, ……..

CALON KEPALA DESA MAJASETRA

…….

Lampiran III : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

JENIS FORMULIR UNTUK PENDATAAN/PENDAFTARAN
DAN DATA PEMILIH HAK PILIH
(FORMULIR MODEL SERI B-PKDM)

1. Formulir Data Pemilih Baru ,sebagai alat Pencatatan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Desa Majasetra oleh Pantarlih (Model B1-PKDM);
2. Formulir Daftar Pemilih Sementara (DPS) ,sebagai Data Hak Pilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Majasetra oleh Pantarlih (Model B2- PKDM);
3. Formulir Data Pemilih Baru ,sebagai alat Perbaikan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Desa Majasetra oleh Pantarlih (Model B3- PKDM);
4. Formulir Data Pemilih Tetap (DPT) ,sebagai alat Data Hak Pilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Majasetra (Model B4- PKDM);
5. Formulir Berita Acara Hasil Pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat RW sebagai Data Hak Pilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa Majasetra (Model B5- PKDM);
6. Formulir Berita Acara Hasil Pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Desa sebagai Data Hak Pilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa Majasetra (Model B6- PKDM);
7. Formulir Berita Acara Hasil Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat RW sebagai Data Hak Pilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Majasetra (Model B7- PKDM);
8. Formulir Berita Acara Hasil Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Desa sebagai Data Hak Pilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa Majasetra (Model B8- PKDM);

Ditetapkan : di Majasetra
Pada Tanggal : 2017

Pj. KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model B5-PKDM

BERITA ACARA
HASIL PENDATAAN DAFTAR PEMULIH SEMENTARA (DPS)
(TINGKAT RUKUN WARGA)

Pada hari ini …….. ,tanggal,…….. Bulan ……. Tahun Dua ribu dua belas ,Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ,telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua RW,Ketua RT dan Seksi Pendataan Pemilih ,membahas hasil pendatan Daftar Pemilih Sementara ,khususnya masyarakat RW……,Desa Majasetra ,dengan hasilnya sebagai berikut:

NO	RUKUN TETANGGA (RT)	JUMLAH HAK PILIH	KETERANGAN
1	**01**		
2	**02**		
3	**03**		
4	**04**		
5	**05**		
6	**06**		
JUMALAH TOTAL			

Daftar nama-nama Pemilih masing-masing RT,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terlampir dalam Berita Acara.
Demikian Berita Acara ini dibuat,untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Majasetra
Pada Tanggal : ……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
Seksi Pendataan Pemilih

……

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN/MENYERTUJUI

Ketua RT.01	**Ketua RT.02**	**Ketua RT.03**
……	**……**	**……**
Ketua RT.04	**Ketua RT.05**	**Ketua RT.06**
……	**……**	**……**

Ketua RW.01

……

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model B6-PKDM

BERITA ACARA
HASIL PENDATAAN DAFTAR PEMULIH SEMENTARA (DPS)
(TINGKAT DESA)

Pada hari ini …….. ,tanggal,…….. Bulan ……. Tahun Dua ribu dua belas ,Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ,telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua Ketua BPD,Calon Kepala yang berhak dipilih ,Panitia Pengawas diantaranya membahas hasil pendatan Daftar Pemilih Sementara , ,dengan hasilnya sebagai berikut:

NO	RUKUN WARGA (RW)	JUMLAH HAK PILIH	KETERANGAN
1	**01**		
2	**02**		
3	**03**		
4	**04**		
5	**05**		
6	**06**		
7	**07**		
8	**08**		
9	**09**		
10	**10**		
11	**11**		
12	**12**		
13	**13**		
14	**14**		
15	**15**		
JUMLAH TOTAL			

Daftar nama-nama Pemilih masing-masing RW,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terlampir dalam Berita Acara.
Demikian Berita Acara ini dibuat,untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Majasetra
Pada Tanggal : ……..

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desa Majasetra

1…….. (……..)
2…….. (……..)
3…….. (……..)
4…….. (……..)
5…….. (……..)

Ketua Panitia Pemilihan

(……..)

Ketua BPD Majasetra

(……..).

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

(……..)

Camat Majalaya

(……..)

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model B7-PKDM

BERITA ACARA
HASIL PENDATAAN DAFTAR PEMULIH TETAP (DPT)
(TINGKAT RUKUN WARGA)

Pada hari ini …….. ,tanggal,…….. Bulan ……. Tahun Dua ribu dua belas ,Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ,telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua RW,Ketua RT dan Seksi Pendataan Pemilih ,membahas hasil pendatan Daftar Pemilih Sementara ,khususnya masyarakat RW……,Desa Majasetra ,dengan hasilnya sebagai berikut:

NO	RUKUN TETANGGA (RT)	JUMLAH HAK PILIH	KETERANGAN
1	**01**		
2	**02**		
3	**03**		
4	**04**		
5	**05**		
6	**06**		
JUMALAH TOTAL			

Daftar nama-nama Pemilih masing-masing RT,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terlampir dalam Berita Acara.
Demikian Berita Acara ini dibuat,untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Majasetra
Pada Tanggal : ……

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
Seksi Pendataan Pemilih

……

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN/MENYERTUJUI

Ketua RT.01	**Ketua RT.02**	**Ketua RT.03**
……	**……**	**……**
Ketua RT.04	**Ketua RT.05**	**Ketua RT.06**
……	**……**	**……**

Ketua RW.01

……

KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model B8-PKDM

BERITA ACARA
HASIL PENDATAAN DAFTAR PEMULIH TETAP (DPT)
(TINGKAT DESA)

Pada hari ini …….. ,tanggal,…….. Bulan ……. Tahun Dua ribu dua belas ,Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ,telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua BPD, Calon Kepala Yang berhak dipilih ,Panitia Pengawas diantaranya membahas hasil pendatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) , ,dengan hasilnya sebagai berikut:

NO	RUKUN WARGA (RW)	JUMLAH PEMILIH SEMENTARA	BERKURANG/ BERTAMBAH	JUMLAH PEMILIH TETAP (DPT)
1	**01**			
2	**02**			
3	**03**			
4	**04**			
5	**05**			
6	**06**			
7	**07**			
8	**08**			
9	**09**			
10	**10**			
11	**11**			
12	**12**			
13	**13**			
14	**14**			
15	**15**			
JUMLAH TOTAL				

Daftar nama-nama Pemilih masing-masing RW,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terlampir dalam Berita Acara.
Demikian Berita Acara ini dibuat,untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Majasetra
Pada Tanggal : ……

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desa Majasetra

1…….. (……..)
2…….. (……..)
3…….. (……..)
4…….. (……..)
5…….. (……..)

Ketua Panitia Pemilihan

(……..)

Ketua BPD Majasetra

(……..).

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

(……..)

Camat Majalaya

(……..)

KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran IV : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (FORMULIR MODEL SERI C-PKDM)

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tempat Pemungutan Suara (Model C- PKDM);

2. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tempat Pemungutan Suara (Model C1- PKDM);

3. Sertifikasi hasil Penghitungan Suara untuk tiap calon Kepala Desa Majasetra di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1- PKDM);

4. Catatan Hasil Perolehan suara untuk tiap calon Kepala Desa Majasetra di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C2- PKDM);

5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tempat Pemungutan Suara (Model C3- PKDM);

6. Catatan pembukaan kotak suara ,Pengeluaran isi,Identifikasi Jenis Dokumen ,dan Penghitungan Jumlah setiap jenis Dokumen untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tempat Pemungutan SuarA (Model C4- PKDM);

7. Penggunaan Surat Suara Tambahan yang digunakan sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5- PKDM);

8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6- PKDM);

9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C6- PKDM);

10. Daftar Nama Pemilih dari TPS lain (Model C7- PKDM);

11. Surat Pengantar / Tanda Terima (Model C8- PKDM);

Ditetapkan : di Majasetra
Pada Tanggal :

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C-PKDM

BARITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ……,Tanggal, …….. Bulan …….. Tahun Dua ribu dua belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra yang dihadiri oleh Saksi Calon, Pengawas dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

II. Pemungutan Suara

A. Persiapan (pukul, 06.00 s.d. 07.00 Wib)
1. Pemeriksaan TPS ,pemasangan daftar Calon Kepala Desa Majasetra,meletakan bilik suara dan Kotak Suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilihan untuk memasuki TPS ,sebanyak tempat duduk yang disediakan;dan
3. penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Calon/Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul,07.00 s.d. 13.00 Wib)
1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada Pukul,07.00;
2. pengucapan sumpah /janji Anggota KPPS ,dipandu oleh Ketua KPPS;
3. pembukaan kotak suara ,pengeluaran seluruh isi kotak suara;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara /pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberia Suara oleh pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 Wib Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

III. Penghitungan Suara (mulai pukul, 13.00 Wib s.d. …..)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan perhitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagagai berikut :
1. mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan tidak memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih di TPS;
2. mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai ,surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan suarat suara tambahan;dan
3. memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa Majasetra di tempat pengumuman suara (Model C2 –PKDM) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara :
KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. membuka kotak suara ,menghitung ,meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang dugunakan oleh pemilih;
2. mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh oleh masing-masing calon Kepala Desa Majasetra;
3. mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III.A Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Kapala Desa Majasetra di tempat pemungutan suara (Model C1- PKDM) ;
2. Sertifikasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Majasetra di tempat pemungutan suara (Model C1- PKDM) ;
3. Hasil perolehan suara untuk tiap Calon Kepala Desa Desa Majasetra di tempat pemungutan suara (Model C2- PKDM) ;
4. Pernyataan keberatan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Desa Majasetra di tempat pemungutan suara (Model C3- PKDM) ;
5. Catatan pembukaan kotak suara ,pengeluaran isi ,Identifikasi jenis dokumen ,dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kapala Desa Majasetra di tempat pemungutan suara (Model C4 - PKDM)
6. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di tempat pemungutan suara (Model C5- PKDM) .

B. Lampiran Berita Acara sebgaimana dimaksud huruf (A) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan Administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran acara dan dikirimkan kepada Panitia Pemilihan :

1. surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C6- PKDM) yang diterima KPPS dari Pemilih;
2. Surat pernyataan pendaping pemilih (Model C7 – PKDM) yang diterima KPPS dari Pemilih;
3. Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C8- PKDM) ;dan
4. Surat pengantar /tanda terima (Model C9- PKDM).

V. Penyampaian Berita Acara dan lampiran Model C1- PKDM :

A. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara d TPS beserta lampirannya dibuat 2 (dua) rangkap:

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilhan Kepala Desa Majasetra;
2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi Calon Kepala Desa Majasetra yang hadir;

B. Sertifikat hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Desa Majasetra di tempat pemungutan suara (Lampiran Model C1- PKDM) selain hal tersebut pada huruf (A) dibuat 2 (dua) rangkap untuk ;

1. pengumuman di Panitia Pemilhan Kepala Desa Majasetra;
2. pengumuman di KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Anggota		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		

Saksi-saksi Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya

No	**Nama**	**Saksi dari nomor urut Calon Kepala Desa Majasetra**	**Tanda Tangan**
1			
2			
3			
4			
5			

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C1-PKDM

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ……..
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

A. DATA PEMILIH

NO	URAIAN	KETERANAGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
2.	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS			
3.	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih			
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain			

B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK SUARA

NO	**URAIAN**	**JUMLAH**
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan (termasuk Cadangan)	
2.	Surat suara tambahan yang diterima dari Panitia Pemilihan	
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru di coblos	
4.	Surat suara yang tidak terpakai	
5.	Surat suara yang terpakai	

C. KLASIFIKASI SURAT SUARA TERPAKAI (berisi surat suara Sah dan Tidak Sah)

NO	**URAIAN**	**JUMLAH**
1	**2**	**3**
1**.**	Surat Suara Sah seluruh Calon Kepala Desa Majasetra (diisi dari huruf A Model C2-PKDM)	
2.	Surat Suara Sah dan Tidak Sah (diisi dari huruf A Model C2-PKDM)	
JUMLAH (1+2)		

Majasetra, …….. 2017

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Majasetra,
P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 100

Lampiran Model C1-PKDM

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK KEPALA DESA MAJASETRA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ……..
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

A. SUARA SAH (Diisi dari huruf A Model C2-PKDM)

NO	NOMOR DAN CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA MAJASETRA
1	2	**3**
1		**Tulis dengan angka =.....** **Tulis dengan huruf = ……**
2		**Tulis dengan angka = ...** **Tulis dengan huruf = ……**
3		**Tulis dengan angka = ...** **Tulis dengan huruf = ……**
4		**Tulis dengan angka = ...** **Tulis dengan huruf = ……**
5		**Tulis dengan angka = ...** **Tulis dengan huruf = ……**
Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Calon		**Tulis dengan angka = ...** **Tulis dengan huruf = ……**

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari huruf B Model C2-PKDM)

NO	SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	**2**	**3**
1.	**SUARA TIDAK SAH**	**Tulis dengan angka=.....** **Tulis dengan huruf = ...**

Catatan : *Apabila terdapat Kesalahan angka dan huruf dalam kolom 3,dicoret angka dan huruf yang salah,kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.*

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		
4.	Anggota		
5.	Anggota		
6.	Anggota		
7.	Anggota		

Saksi-saksi Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya

No	**Nama**	**Saksi dari nomor urut Calon Kepala Desa Majasetra**	**Tanda Tangan**
1			
2			
3			
4			
5			

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C2-PKDM

CATATAN PENGHITUNGAN SUARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA KEC. MAJALAYA

NOMOR, NAMA DAN FOTO CALON		SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON							
NO.	NAMA & FOTO	SUARA SAH						JML.SUARA SAH TIAP BARIS	JML.SUARA SAH TIAP CALON
Dst.									
JUMLAH SUARA SAH									
SUARA TIDAK SAH/ BLANKO									
JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA									

Majasetra, ……2017
KELOMPOK PENCATAT PENGHITUNGAN SUARA
K e t u a ,

_____

Anggota :

1. …….. (……)
2. …….. (……)
3. …….. (……)
4. …….. (……)

dst.

Saksi-saksi :

1. …….. (……)
2. …….. (……)
3. …….. (……)
4. …….. (……)

dst.

Majasetra, ……2017
P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C3-PKDM

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ……..
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh Saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama Saksi	Saksi dari nomor urut Calon Kepala Desa Majasetra	Isi Keberatan
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……

Kejadian khusus (Peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

***) Catatan** *: Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat*

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C4-PKDM

CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS
DOKUMEN DAN PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP
JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari Panitia Pemilihan :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Kepala Desa majasetra	…….. lembar
2.	Formulir Seri C Model C1- PKDM s.d Model C9-PKDM (kecuali Model C6-PKDM)	…….. Set
3.	Sampul	…….. lembar
4.	Alat Pencoblos dan alas pencoblos	…….. Set
5.	Segel Pemilihan Kepala Desa	…….. lembar
6.	Lem/Perekat	…….. buah
7.	Kantong Palstik	…….. buah
8.	Karet Pengikat	…….. buah
9.	Spidol	…….. buah
10.	Tanda Khusu/tinta	…….. buah
11.	Ballpoin warna biru	…….. buah

Majasetra, …….. 2017

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C5-PKDM

PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ……. Tanggal ……., Bulan,……., Tahun Dua ribu dua belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ……..
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Telah menggunakan surat suara pemilihan Kepala Desa Majasetra cadangan sebanyak ……. (……) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya atau surat suara yang rusak.

Majasetra, …….. 2017

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C6-PKDM

SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU
DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di TPS…….
Desa Majasetra ,Kecamatan Majalaya diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih ……..
2. Nomor Urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS ……..

Untuk memberikan suara pada :
Hari,Tanggal : ……..
Pukul : 08.00 s.d 13.00 Wib
Tempat/Alamat TPS : ……..

Majasetra, …….. 2017

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Catatan : 1. Surat pemberitahuan ,agar dibawa pada hari dan tanggal tersebutr di atas.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul,13.00 Wib sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat,diberi kemudahan dalam memberikan suaradapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir model C7-PKDM

…… *Potong disini* ……

TANDA TERIMA

Terima disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih : ……
TPS/Desa Majasetra : ……

Majasetra, ……,……2017

Yang Menerima,

…….

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C7-PKDM

SURAT PERNYATAAN
PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Alamat : ……

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Majasetra, ……,……2017

Yang Membuat Pernyataan,

……

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model C8-PKDM

DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN

NO	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR URUT DPT	KETERANAGAN (ASAL PEMILIH)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6

Majasetra, …….. 2017

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran V : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

JENIS FORMULIR UNTUK PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN
(FORMULIR MODEL SERI D-PKDM)

1. Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tingkat Desa oleh Panitia Pemilihan (Model D- PKDM);

2. Formulir Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tingkat Desa (Model D1- PKDM);

3. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih ,TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tingkat Desa (Lampiran 1 Model D1- PKDM);

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tingkat Desa (Lampiran 2 Model D1- PKDM);

5. Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di Tingkat Desa (Model D2- PKDM);

Ditetapkan : di Majasetra
Pada Tanggal :

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model D-PKDM

BERITA ACARA
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
DI TINGKAT DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini ……,Tanggal, …….. Bulan …….. Tahun Dua ribu dua belas Panitia Pemilihan melaksanakan rapat Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra yang dihadiri oleh Calon atau Saksi Calon,Pengawas dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Rekapitulasi Perhitungan Suara : Balai Musyawarah Desa Majasetra
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Rekspitulasi Penghitungan Suara (mulai pukul ……. Sampai dengan …….)

A. Persiapan sebelum Rekapitulasi penghitungan suara suara ,Panitia Pemilihan melakukan kegiatan sebagai berikut :
   1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara dari masing-masing TPS ;
   2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai ,surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan dari masing-masing TPS;dan
   3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap calon Kepala Desa Majasetra dari masing-masing TPS di tempat rekapitulasi penghitungan suara (Model D1- PKDM) ukuran besar.

B. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan suara .
   Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra melakukan kegiatan sebagai berikut :
   1. Membuka Berita Acara Pemungutan Suara ,menghitung ,meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari masing-masing TPS;
   2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa Majasetra dari masing-masing TPS;
   3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah dari masing-masing TPS.

II.A Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan untuk Pemilihan Kepala Desa Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Kapala Desa Majasetra di tempat pemungutan suara (Model D1- PKDM) ;
2. Rekapitulasi jumlah pemilih ,TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di tingkat Desa (Model D1 - PKDM) ;
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di tingkat Desa (Lampiran 2Model D1- PKDM) ;
4. Pernyataan keberatan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di tingkat Desa (Model D2- PKDM).

B. Lampiran Berita Acara sebgaimana dimaksud huruf (A) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan Administrasi lain yang tidak termasuk dalam lampiran acara dan dikirimkan kepada BPD :

1. surat pemberitahuan waktu dan tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di tingkat Desa (Model D3- PKDM) ;
2. Formulir Surat Pengantar Menyampaikan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra di tingkat Desa oleh KPPS (Model D4 – PKDM) yang diterima KPPS dari Pemilih;
3. Formulir Berita Acara penerimaan Kotak suara ,berkas kelengkapan Administrasi dari KPPS (Model D5- PKDM) .

V. Penyampaian Berita Acara dan lampiran Model D1-PKDM :

A. Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa /Panitia Pemilihan Desa Majasetra beserta lampirannya dibuat 2(dua) rangkap :
1. 1 (satu) rangkap untuk BPD;
2. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi Calon Kepala Desa Majasetra yang hadir;

B. Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Desa Majasetra di tingkat Desa (Lampiran Model D1- PKDM) selain hal tersebut pada huruf (A) dibuat 2 (dua) rangkap untuk ;

1. pengumuman di BPD;
2. pengumuman di Panitia Pemilihan Desa .

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua		
2.	Anggota		
3.	Anggota		

Saksi-saksi Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya

No	Nama	Saksi dari nomor urut Calon Kepala Desa Majasetra	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Model D1-PKDM

CATATAN PELAKSANAAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
DI TINGKAT DESA

Panitia Pemilihan : Kepala Desa Majasetra
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

A. CATATAN REKAPITULASI DATA PEMILIH

NO	URAIAN	KETERANAGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (diisi dari no.1 lampiran 1 Model D1-PKDM)			
2.	Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS(Diisi dari no.2 lampiran 1 model D1-PKDM)			
3.	Jumlah Pemilih dari TPS lain (Diisi dari no.3 lampiran 1 model D1-PKDM)			
4	Jumlah Pemilih Terdaftar (1+2+3)			
5.	Jumlah TPS			

B. CATATAN REKAPITULASI PENGGUNAAN SURAT SUARA DI TPS DALAM WILAYAH PANITIA PEMILIHAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Jumlah surat suara yang rusak /keliru dicoblos dari seluruh TPS (Diisi dari no.4 lampiran model D4-PKDM)	
2.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai dari seluruh TPS (Diisi dari no.4 lampiran model D5-PKDM)	
3.	Jumlah surat suara yang terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS (Diisi darihuruf A lampiran 2 model D1-PKDM)	
4.	Jumlah surat suara yang terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS (Diisi darihuruf B lampiran 2 model D1-PKDM)	
5.	Jumlah Surat suara yang diterima dari seluruh TPS (Jumlah 1+2+3+4+5)	

Majasetra,…….., ……..

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran 1 Model D1-PKDM

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH ,TPS ,DAN SURAT SUARA PEMELIHAN KEPALA DESA MAJASETRA TAHUN 2017

NO	ITEM		PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON			JUMLAH AKHIR
			TPS.01	TPS.02	TPS.03	
1	Jumlah Pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki				
		Perempuan				
		Jumlah				
2	Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS	Laki-laki				
		Perempuan				
		Jumlah				
3	Jumlah Pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya	Laki-laki				
		Perempuan				
		Jumlah				
4	Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dari seluruh TPS					
5	Jumlah surat suara yang tidak terpakai					
6	Jumlah surat suara yang terpakai					
7	Jumlah seluruh TPS diwilayah KPPS					

PANITIA PEMILIHAN TANDA TANGAN

KETUA

……. …….

SAKSi NAMA TANDA TANGAN

Nomor 1 …….. ……

Nomor 2 …….. ……

Nomor 3 …….. ……

Nomor 4 …….. ……

Nomor 5 …….. ……

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI

NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran 2 Model D1-PKDM

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT DESA
PEMELIHAN KEPALA DESA MAJASETRA TAHUN 2017

A. SUARA SAH

NO	NAMA CALON DAN FOTO CALON	PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON			JUMLAH AKHIR
		TPS 01	TPS.02	TPS.03	
1	2	3	4	5	**6**
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH					

B. SUARA TIDAK SAH

NO	NAMA CALON DAN FOTO CALON	PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON			JUMLAH AKHIR
		TPS 01	TPS.02	TPS.03	
1	2	3	4	5	6
1	SUARA TDK SAH				
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH					

C. JUMLAH SUARA

JUMLAH SUARA				

Catatan :

1. Pada kolom 1 tulis nomor dan kolom 2 tulis nama calon Kepala Desa Majasetra .
2. Formulir ini dianggap sah apabila ditanda tangani oleh Ketua Pamelihan dan saksi calon yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN TANDA TANGAN
KETUA

……. …….

SAKSi NAMA TANDA TANGAN
Nomor 1 …….. …….
Nomor 2 …….. …….
Nomor 3 …….. …….
Nomor 4 …….. …….
Nomor 5 …….. …….

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Model D2-PKDM

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN HASIL REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA
DI TINGKAT DESA

Panitia Pemilihan : Kepala Desa Majasetra
Desa : Majasetra
Kecamatan : Majalaya
Kabupaten : Bandung
Provinsi : Jawa Barat

Catatan pernyataan keberatan oleh Saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

Nama Saksi	Saksi dari nomor urut Calon Kepala Desa Majasetra	Isi Keberatan
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Kejadian khusus (Peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

***) Catatan** *: Ada atau tidak ada keberatan agar dicatat*

Majasetra,

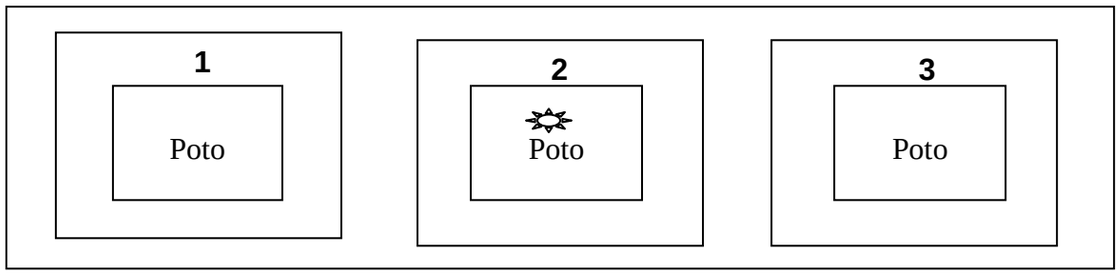
P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

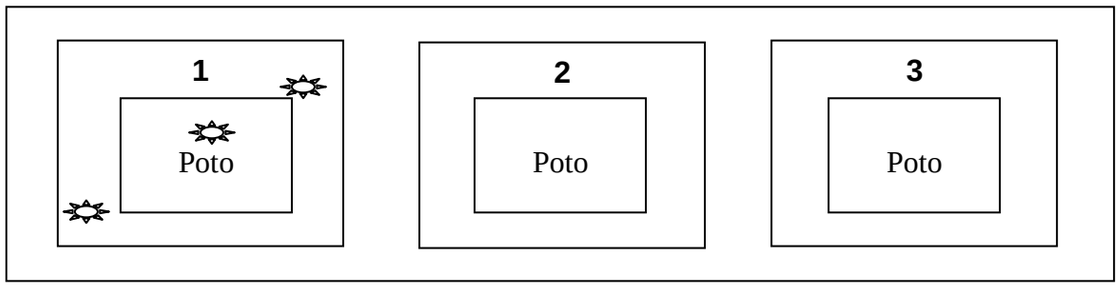
Lampiran VI : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

CONTOH SURAT SUARA , SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

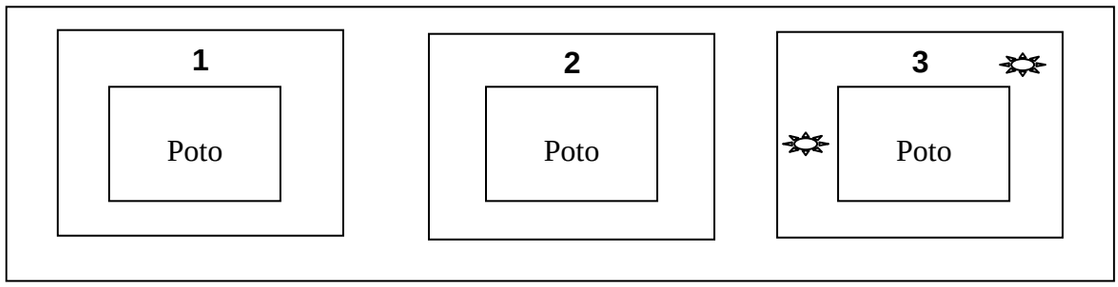
1. Suara yang dinyatakan Sah
   a. Coblosan tepat pada gambar calon



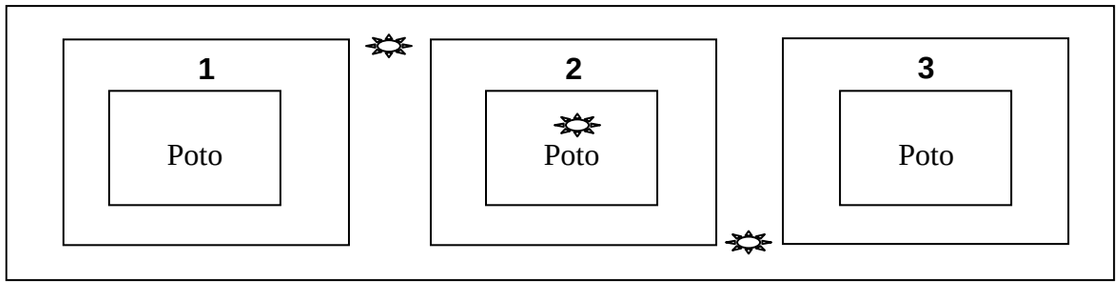
   b. Coblosan lebih dari satu yaitu pada gambar foto calon dan di luar gambar foto calon , namun masih dalam garis pembatas gambar foto calon



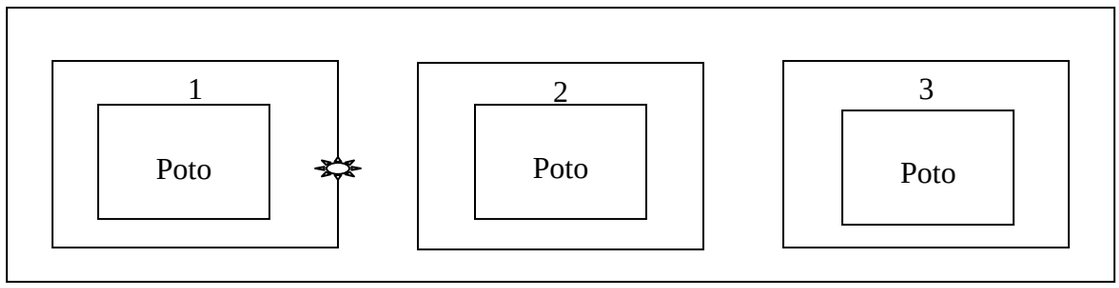
   a. Terdapat satu coblosan atau lebih di luar gambar foto calon , namun masih di dalam garis pembatas gambar calon .



   b. Terdapat lebih dari satu coblosan yang terletak pada salah satu gambar foto calon dan diluar garis pembatas gambar foto calon , namun tidak mengenai gambar foto calon yang lainnya .

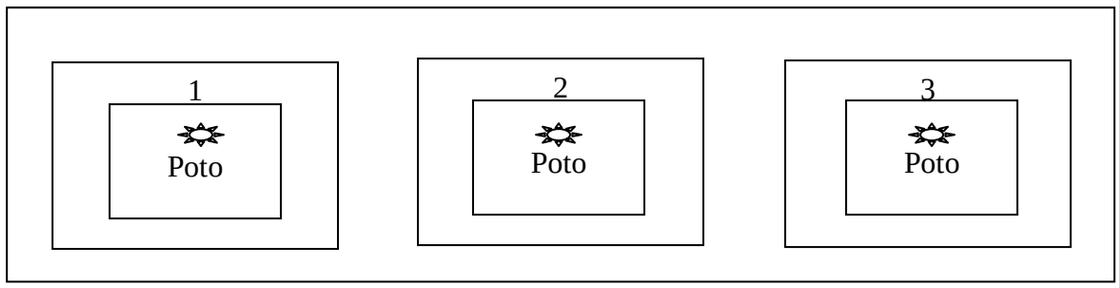


c. Coblosan tepat pada garis pembatas gambar fhoto calon

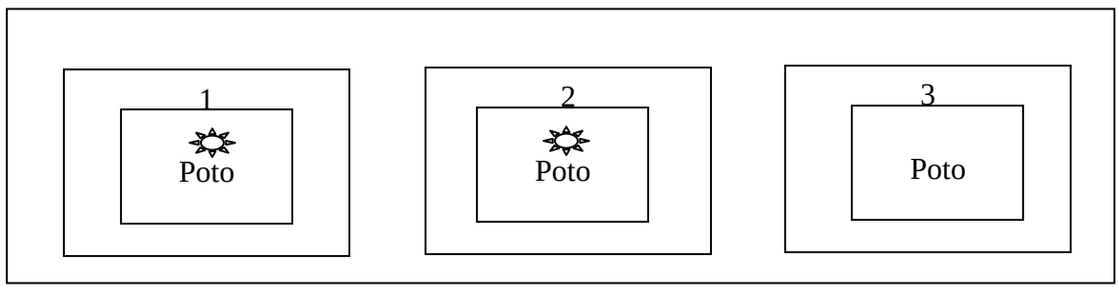


2. Suara yang dinyatakan Tidak Sah

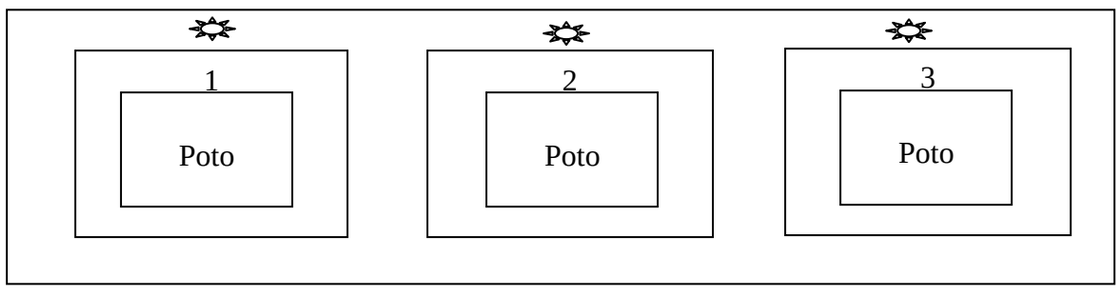
a. Coblosan lebih dari satu yang menusuk kepada semua gambar foto calon



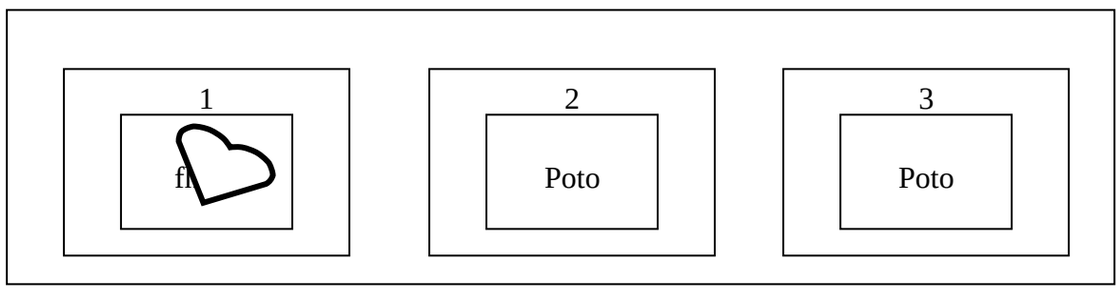
b.Terdapat lebih dari satu coblosan dan menusuk lebih dari satu gambar foro calon



c. Terdapat satu coblosan atau lebih diluar seluruh gambar foto calon



d. Terdapat coblosan yang tidak menggunakan alat yang telah disediakan



Lampiran VII : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN KESEPAKATAN JUMLAH TPS , LOKASI TIAP TPS , JUMLAH BILIK SUARA TIAP TPS , JUMLAH KOTAK SUARA DAN TEMPAT PENGHITUNGAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung masing-masing bernama :

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……...
5. ……

Dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Majasetra Kecamatan Majalaya menyatakan SETUJU bahwa :

a. Jumlah TPS sebanyak ……
b. Lokasi tiap-tiap TPS masing-masing di……
c. Jumlah Bilik Suara tiap TPS disesuaikan dengan kebutuhan / banyaknya hak pilih tiap TPS ;
c. Jumlah Peti /Kotak Suara sebanyak ……
d. Penghitungan Suara tiap-tiap TPS dilaksanakan di lokasi TPS masing-masing
e. Penghitungan suara secara keseluruhan dilaksanakan di Kantor Desa .

Apabila dikemudian hari timbul gugatan-gugatan atau pernyataan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang menyatakan bahwa jumlah TPS lokasi tiap TPS , Jumlah Kamar/ Bilik Suara tiap TPS jumlah Peti /Kotak Suara dan tempat Penghitungan suara tidak mendapat persetujuan dari para Calon Kepala Desa, maka hal itu merupakan suatu pengacauan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Dibuat di : Majasetra

Pada tanggal : ……

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a ,

……

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

……

TANDA TANGAN

Calon Kepala Desa : ……

1. ……(……)
2. ……(……)
3. ……(……)
4. ……(……)
5. ……(……)

Majasetra,

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran VIII : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN BERSAMA CALON KEPALA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini kami para Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya , masing-masing bernama :

1. ……
2. ……
3. ……
4 ……
5. ……

Pada hari ini ……..Tanggal…… bertempat di …… Kecamatan Majalaya .Dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan dan BPD/Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa, kami mengucapkan *DEMI ALLAH* apabila dari seseorang calon terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, selaku calon Kepala Desa lainnya :

a. Tidak akan merasa iri hati, karena kami sadar bahwa itu adalah nasib yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kami tidak akan mengajukan tuntutan sesuatu apapun seandainya kami, tidak terpilih.
b. Akan turut memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil guna kelancaran roda Pemerintahan Desa.
c. Selalu akan memelihara rasa kebersamaan dalam masyarakat dan menghargai kehidupan berdemokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya , tanpa desakan dari pihak manapun juga serta apabila dikemudian hari kami mengingkari pernyataan tersebut, maka bersedia untuk menerima segala sanksinya.

Dibuat di : Majasetra

Pada tanggal : ……

TANDA TANGAN

Calon Kepala Desa : ……

1. ……(……)
2. ……(……)
3. ……(……)
4. ……(……)
5. ……(……)

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a ,

……

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

……

Majasetra, ……2017

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran IX : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN DIMULAI DAN DITUTUPNYA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya, masing-masing bernama :

1. ……
2. ……
3. ……
4 ……
5. ……

Pada hari ini …… tanggal ……. Menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra ,Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dimulai pada pukul ……WIB dan ditutup pada pukul …….. WIB dengan catatan bahwa :

a. Apabila pada waktu akan ditutup pemungutan suara masih ada hak pilih di ruang tunggu, maka waktunya diperpanjang sampai hak pilih tersebut selesai melaksanakan hak pilihnya.
b. Apabila sebelum batas / limit waktu pemungutan suara berakhir , ternyata hak pilih yang terdaftar telah seluruhnya melaksanakan haknya , maka penutupan pemungutan suara dapat dipercepat.

Demikian surat pernyataan ini, kami buat dengan sesungguhnya untuk dijadikan bahan seperlunya.

Dibuat di : Majasetra

Pada tanggal : ……

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a ,

……

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

……

TANDA TANGAN

Calon Kepala Desa : ……

1. ……(……)
2. ……(……)
3. ……(……)
4. ……(……)
5. ……(……)

Majasetra, ……2017

KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran X : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT DESA

Pada hari ini …….. ,tanggal,…….. Bulan ……. Tahun Dua ribu dua belas , dengan disaksiakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya, Ketua BPD,Panitia Pengawas ,dan Camat Majalaya, kami para calon Kepala Desa Majasetra dengan ini menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa Majasetra ,Kecamatan Majalaya ,telah dilaksanakan pada hari …… tanggal ……Bulan……Tahun …… yang berlokasi :

1. TPS I berada di ……dengan jumlah bilik Suara sebanyak ……. Kamar jumlah Pemilih ….....Orang.
2. TPS I berada di ……dengan jumlah bilik Suara sebanyak ……. Kamar jumlah Pemilih ……Orang.
3. TPS I berada di ……dengan jumlah bilik Suara sebanyak ……. Kamar jumlah Pemilih ……Orang.

Dengan hasil pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk :……
2. Jumlah Hak Pilih :……
3. Hak Pilih Yang ditolak : ……
4. Hak Pilih Yang menggunakan hak pilinya : ……
5. Surat Suara yang disediakan : ……
6. Surat Suara yang tidak digunakan : ……
7. Jumlah Surat Suara yang Sah : ……
8. Jumlah Surat Suara yang Tidak Sah : ……
9. Jumlah Surat Suara abstain : ……
10. Kiskusen1/5 dari halk pilih yang menggunakan hak pilihnya : ……

Suara yang diperoleh dari masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Suara yang diperoleh dan SAH	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					

Calon yang mendapat Kiskusen Yaitu :

1. …….
2. …….
3. Dst.

Calon Yang mendapat Suara Terbanyak : …….

Selain itu, kami menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya dinyatakan SAH sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Berita Acara ini dibuat ,untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Majasetra
Pada Tanggal : ……..

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desa majasetra

1…….. (……..)

2…….. (……..)

3…….. (……..)

4…….. (……..)

5…….. (……..)

Ketua Panitia Pemilihan

(……)

Ketua BPD Majasetra

(……).

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

(……..)

Camat Majalaya

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

(……..)

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran XI : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT DESA

Pada hari ini …….. ,tanggal,…….. Bulan ……. Tahun Dua ribu dua belas ,Panitia Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya ,telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua BPD, Calon Kepala Yang berhak dipilih ,Panitia Pengawas ,setelah kami mengikuti dan /atau menerima laporan dari saksi kami masing-masing di tiap TPS , menyaksikan pembukaan kotak suara , mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tiap TPS serta dilaksanakannya proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa ,maka kami menyatakan proses penghitungan surat suara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan kami mendapatkan kepuasan serta tidak terdapat hal-hal yang mencurigakan atau tidak ada indikasi kecurangan.

Adapun hasil penghitungan suara dari masing-masing calon kepala Desa adalah sebagaiberikut:

No	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara		Tanda Tangan	Keterangan
		Suara Sah	Suara Tidak Sah		
1					
2					
3					
4					
5					

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya ,untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Majasetra
Pada Tanggal : ……..

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN
Para Calon Kepala Desa Majasetra

1…….. (……..)
2…….. (……..)
3…….. (……..)
4…….. (……..)
5…….. (……..)

Ketua Panitia Pemilihan

(……..)

Ketua BPD Majasetra

(……..).

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

(……..)

Camat Majalaya

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

(……..)

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran XII : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

SURAT PERNYATAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para Calon Kepala Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya, masing-masing bernama :

1. ……
2. ……
3. ……
4 ……
5. ……

Setelah menyaksikan pembukaan kotak suara serta penghitungan hasil suara untuk masing-masing calon , maka kami dapat menerima hasil penghitungan suara dimaksud, dengan penuh kesadaran , ketulusan dan lapang dada , tanpa ada adanya tekanan dari pihak manapun juga .

Adapun hasil penghitungan suara dari masing-masing calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Calon	Nomor Undian	Suara yang diperoleh dan sah	Tanda tangan calon	Keterangan
1. 2. 3. 4. 5.	…… …… …… …… ……		…… …… …… …… ……	1. …… 2. …… 3. …… 4. …… 5. ……	

Surat pernyataan ini kami tanda tangani dihadapan Panitia Pemilihan , BPD , Panwas dan tokoh masyarakat . Apabila dikemudian hari kami mengingkari pernyataan tersebut, maka kami bersedia untuk menerima segala sanksinya sesuai peraturan yang berlaku .

Demikian pernyataan ini kami buat , untuk dijadikan bahan selanjutnya .

Dibuat di : Majasetra

Pada tanggal : ……

MENGETAHU I/ MENYAKSIKAN :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a ,

……

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

……

TANDA TANGAN

Calon Kepala Desa Majasetra

1. ……(……)
2. ……(……)
3. ……(……)
4. ……(……)
5. ……(……)

Majasetra, ……2017

KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran XIII : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

PERNYATAAN SAHNYA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Calon Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya, masing-masing bernama :

1. ……
2. ……
3. ……
4 ……
5. ……

Dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan dan BPD/Penanggung jawab Pemilihan Kepala Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Pada :

H a r i : ……
Tanggal : ……
Tempat : ……

adalah **sah** dan tidak terdapat kecurangan-kecurangan apapun serta kami dapat menerima hasilnya.

Apabila dikemudian hari timbul gugatan atau pernyataan-pernyataan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dimaksud tidak sah atau terdapat kecurangan-kecurangan, maka hal itu merupakan sesuatu pengacauan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya , tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Dibuat di : Majasetra

Pada tanggal : ……

TANDA TANGAN

Calon Kepala Desa : ……

1. ……(……)
2. ……(……)
3. ……(……)
4. ……(……)
5. ……(……)

MENGETAHUI/MENYAKSIKAN :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa

K e t u a ,

……

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

……

Majasetra, ……2017

P.j KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

Lampiran XIV : PERATURAN DESA MAJASETRA
Nomor :
Tanggal :

PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Dengan ini dipermaklumkan , bahwa pemilihan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya telah dilaksanakan pada hari ……Tanggal ……Tahun 2006 mulai pukul …. WIB s/d ……..WIB bertempat di ……

Adapun hasilnya dapat kami umumkan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk : …….. Jiwa
2. Jumlah hak pilih : …….. Orang
3. Hak pilih yang ditolah : …….. Orang
4. Hak pilih yang menggunakan hak pilihnya : …….. Orang
5. Kartu suara yang disediakan : …….. Lembar
6. Kartu suara yang tidak dipergunakan : …….. Lembar
7. Suara yang sah : …….. Suara
8. Suara yang tidak sah/blanko : …….. Suara
9. Kiskusen 1/5 dari hak pilih yang menggunakan hak pilihnya : …….. Suara

Suara yang diperoleh masing-masing calon sebagai berikut :

Nomor Undian	N a m a	Tanggal lahir (Umur)	Pekerjaan	Hasil suara	Keterangan
1. 2. dst.					

Calon yang mendapat kiskusen yaitu :

1. …….
2. …….

Dst.

Sedangkan calon terpilih dan mendapatkan suara terbanyak

Yaitu …….

Majasetra, ……2017

KEPALA DESA MAJASETRA

AGUNG RAHADIAN, S.IP, M.SI
NIP. 19761213 201001 1002

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN MAJALAYA
KEPALA DESA MAJASETRA
Jalan Raya Majalaya – Rancaekek No. 220 Telp. (022)5950001

Majasetra,

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui;
Bapak Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

SURAT PENGANTAR
Nomor : / /Pem

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Peraturan Desa Majasetra No : Tahun 2017 tentang PetunjukTeknis Pencalonan,Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	1 (satu) buku	Disampai dengan hormat untuk diketahui dan diunmdangankan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

CAMAT MAJALAYA

.....

Tembusan : disampaikan kepada :
1.Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung;
2.Yth. Asisten Pemeritah Setda Kabupaten Bandung.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN MAJALAYA
KEPALA DESA MAJASETRA
Jalan Raya Majalaya – Rancaekek No. 220 Telp. (022)5950001

Majasetra,

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui;
Bapak Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

SURAT PENGANTAR
Nomor : / /Pem

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Peraturan Desa Majasetra No : Tahun 2017 tentang PetunjukTeknis Pencalonan,Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung	1 (satu) buku	Disampai dengan hormat untuk diketahui dan di Undangankan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

CAMAT MAJALAYA

.....

Tembusan : disampaikan kepada :
1.Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung;
2.Yth. Bapak Asisten Pemeritah Setda Kabupaten Bandung.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN MAJALAYA
KEPALA DESA MAJASETRA
Jalan Raya Majalaya – Rancaekek No. 220 Telp. (022)5950001

Majasetra,

Kepada
Yth. Bapak Bupati Bandung
Melalui;
Bapak Kepala BPMPD
di
S O R E A N G

SURAT PENGANTAR
Nomor :141/ /Pem

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Peraturan Desa Majasetra Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dari Desa Majasetra Kecamatan Majalaya	2 (dua) Buku	Disampai dengan hormat untuk diketahui dan di Undangankan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

CAMAT MAJALAYA

.....

Tembusan : disampaikan kepada :
Yth. Kepala Bidang Hukum Sekda Kabupaten Bandung

MODEL B4- PKDM

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
SEBAGAI DATA HAK PILIH TETAP PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA MAJASETRA

RT : ..... **RW** : .....
Desa Majasetra

No.	Nama	L / P	Nomor NIK	Tempat Tgl lahir	Umur	Status Perkawinan	ket
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							

MODEL B3- PKDM

DATA PEMILIH BARU SEBAGAI ALAT
PERBAIKAN HAK PILIH OLEH PANTARLIH

RT : ..... **RW** : .....
Desa Majasetra

No.	Nama	L / P	Nomor NIK	Tempat Tgl lahir	Umur	Status Perkawinan	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							

MODEL B2- PKDM

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
SEBAGAI DATA HAK PILIH SEMENTARA
OLEH PATARLIH

RT : ..... **RW** : .....
Desa Majasetra

No.	Nama	L / P	Nomor NIK	Tempat Tgl lahir	Umur	Status Perkawinan	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							

MODEL B1- PKDM

DATA PEMILIH BARU TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT)
SEBAGAI ALAT PENCATATAN HAK PILIH
OLEH PANTARLIH

RT : ..... **RW** : .....
Desa Majasetra

No.	Nama	L / P	Nomor NIK	Tempat Tgl lahir	Umur	Status Perkawinan	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							